

**Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan
Dan Pengamen di Kabupaten Gowa**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Bosowa Makassar

Oleh:

DEDEN HENDRAWAN

4518021038

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Proposal : Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen Dikabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Deden Hendrawan

Nomor Stambuk : 4518021038

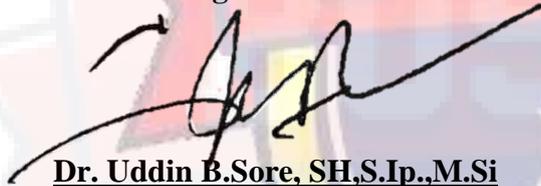
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Seminar Proposal pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

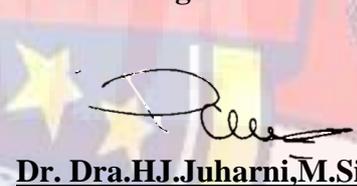
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Uddin B.Sore, SH,S.Ip.,M.Si
NIDN. 0906016701

Pembimbing II



Dr. Dra.HJ.Juharni,M.Si
NIDN. 0907076701

Mengetahui,

**Dekan FISIP
Universitas Bosowa**



Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara**



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

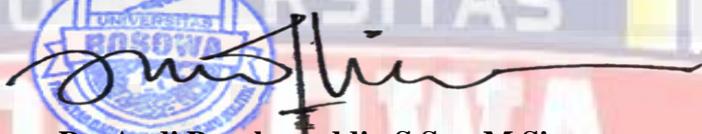
Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen di Kabupaten Gowa.**

Nama Mahasiswa : Deden Hendrawan
Nomor Stambuk : 4518021038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

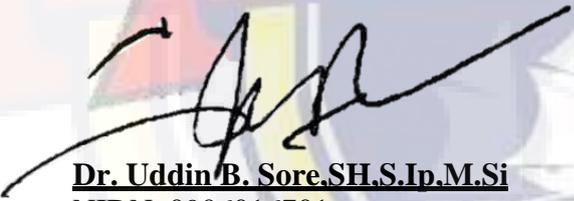
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Makassar, 20 Februari 2023

Pengawas Umum :


Dr. Andi Burchanuddin.S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107003

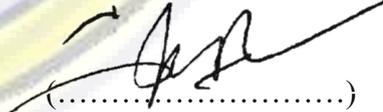
Panitia Ujian :


Dr. Uddin B. Sore.SH,S.Ip.M.Si
NIDN. 0906016701


Dr.Dra. Hj. Juharni.M.Si
NIDN. 0907076701

Tim Penguji :

1. Dr. Uddin B. Sore,SH,S.Ip,M.Si
2. Dr. Dra. Hj. Juharni,M.Si
3. Nining Haslinda Zainal.S.Sos.,M.Si
4. Didik Iskandar,S.Sos.,M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deden Hendrawan

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen Di Kabupaten Gowa

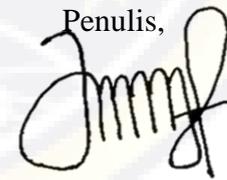
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis,



Deden Hendrawan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas berkat rahmat dan hidayahNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Evaluasi Peran Dinas Sosial Kabupaten Gowa Dalam Penertiban Anak Jalan Dan Pengamen Di Wilayah Kabupaten Gowa”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya berkat adanya bimbingan, kerja keras, dan do'a serta sumbangsi dari berbagai pihak secara moral maupun spiritual, maka semua masalah dan hambatan dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Darwin dan ibunda Hariyati beserta satu saudara tercinta Dedi Hermawan yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Ayahanda Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M., Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Dalam Hal ini Ibu Hj. Rizkayana Sabir, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial atas waktu yang telah diberikan

untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

4. Ibunda Dr. Hj. Asmirah, M.Si selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
5. Ayahanda Drs. Natsir Tompo.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Ayahanda Dr.Uddin B Sore,SH.,M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Ibunda Dr. Dra. Hj. Juharni. M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si, dan Bapak Didik Iskandar,S.Sos.,M.Si, selaku penguji yang telah menyumbangkan ide, saran, dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Kak Budi selaku staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Keluarga Besar Pramuka SMA Negeri 10 Gowa yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
11. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga besar Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sospol Universitas Bosowa yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

12. Seluruh saudara(i) seperjuangan saya angkatan ARASH18 atas segala dukungan dan dorongannya selama proses penyusunan skripsi.
13. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doa'nya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, menyusun skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik, Oleh karena itu, penulis juga menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Makassar, 15 Desember 2022

Penulis

Deden Hendarawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIASI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. BATASAN MASALAH	6
C. RUMUSAN MASALAH	8
D. TUJUAN PENELITIAN.....	8
E. MANFAAT PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KONSEP EVALUASI	9
1.1 Pengertian Evaluasi	9
1.2 Fungsi Evaluasi	11
1.3 Tujuan Evaluasi	11
1.4 Tahapan Evaluasi.....	12
1.5 Indikator Evaluasi Program	14
B. DINAS SOSIAL	
2.1 Pengertian Dinas Sosial	17
2.2 Peran Dinas Sosial.....	19

C. KONSEP ANAK JALANAN DAN PENGAMEN	
3.1 Pengertian Anak Jalanan	22
3.2 Pengelompokan Anak Jalanan	23
3.3 Faktor – Faktor penyebab anak Jalanan	25
3.4 Kategori Anak Jalanan.....	27
3.5 Definisi Pengamen.....	29
D. Peneliti Terdahulu.....	31
E. KERANGKA PIKIR.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	38
B. Jenis Penelitian,Pendekatan Dan Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Informan Penelitian	42
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Deskripsi Dinas Sosial Kabupaten Gowa	50
C. Perkembangan Anak Jalanan Dan Pengamen.....	56
1. Evaluasi Penertiban Anak Jalanan dan Pengamen	63
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penertiban	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kab. Gowa49

Tabel 2 Jumlah Anjal Dan Pengamen Kab. Gowa57



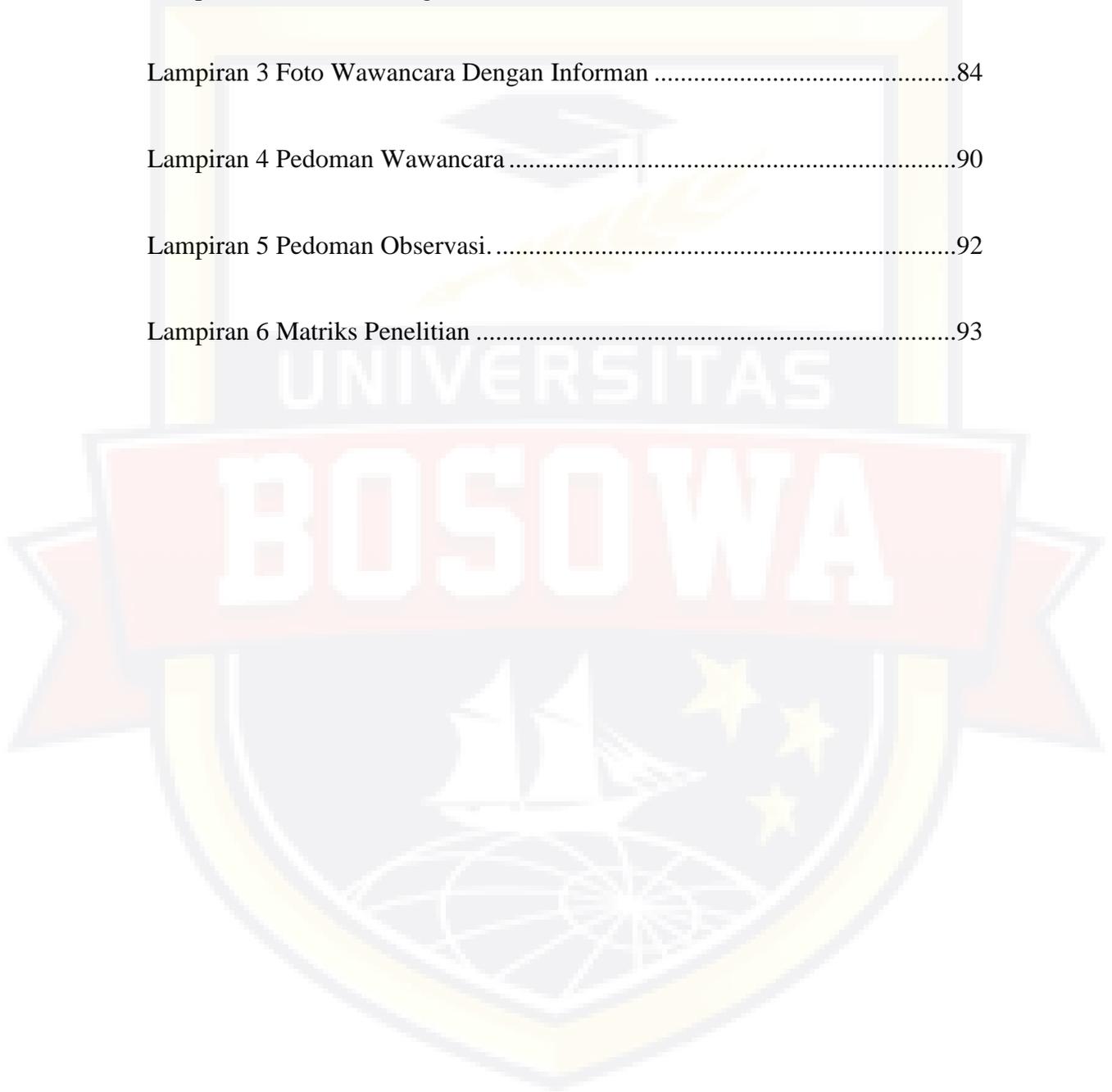
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 2 Peta Kab. Gowa	48
Gambar 3 Struktur Dinas Sosial Kab. Gowa	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Izin Penelitian.....	82
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	83
Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Informan	84
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	90
Lampiran 5 Pedoman Observasi.....	92
Lampiran 6 Matriks Penelitian	93



Abstrak

Deden Hendrawan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa dengan judul Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen di Kabupaten Gowa, di bawah bimbingan Dr. Uddin B.Sore,SH.,S.Ip.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr.Dra.Juharni,M.Si selaku Dosen Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa terhadap anak jalanan dan pengamen serta faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observasi, wawancara (Interview) langsung dengan Key Informan,dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2016) yaitu, reduksi data, penyajian data/Display Data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan dan pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa masih belum efektif dalam menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam hal ini anak jalanan dan pengamen yang ada di Kabupaten Gowa. Dinas Sosial dalam melakukan penertiban merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meskipun sudah dilakukan penertiban, masih saja banyak ditemukan anak jalanan dan pengamen yang kembali turun ke jalanan. Masalah utama penghambat penertiban anak jalanan dan pengamen adalah keterbatasan sarana dan prasaran untuk menampung khusus anak jalanan dan pengamenagar diberikan penanganan atau pembinaan lebih lanjut,kurangnya anggaran dana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan pengamen, tidak adanya produk hukum terkait sanksi- sanksi dan pembinaan bagi anak jalanan dan pengamen serta sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan dan pengamen agar tidak kembali turun ke jalanan.

Kata Kunci : Penertiban, Anak Jalanan, Pengamen, Dinas Sosial

ABSTRACT

Deden Hendrawan, Department of State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bosowa with the title Evaluation of the Role of the Social Service in Controlling Street Children and Buskers in Gowa Regency, under the guidance of Dr. Uddin B. Sore, SH.,S, Ip.,M.Si as Supervisor I and Dr.Dra.Juharni, M.Si as Advisor II

This study aims to find out the control that was carried out by the Gowa Regency Social Service against street children and buskers as well as the supporting and inhibiting factors of the Gowa Regency Social Service in controlling street children and buskers.

The research method used is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out using field work research, namely observation, direct interviews with key informants, and documentation. The data analysis used is the interactive model data analysis of Miles and Huberman in (Sugiyono, 2016), namely, data reduction, data presentation/Display Data, and drawing conclusions.

The results showed that controlling street children and buskers carried out by the Gowa Regency Social Service was still not effective in solving social welfare problems (PMKS), in this case street children and buskers in Gowa Regency. The Social Service in carrying out enforcement refers to Regional Regulation Number 05 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection. Even though the control has been carried out, there are still many street children and buskers who return to the streets. The main problems hindering the control of street children and buskers are limited facilities and infrastructure to specifically accommodate street children and buskers so that they are given further treatment or guidance, lack of budgetary funds, lack of outreach to the public so as not to give money to street children and buskers, the absence of legal products related to sanctions and coaching for street children and buskers and the difficulty of changing the mentality and behavior of street children and buskers so they don't return to the streets.

Keywords : Controlling, Street Children, Buskers, Social Service

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan pada tahun 1945, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tanah air negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia, Indonesia sebagai negara yang masih masuk kategori negara berkembang harus senantiasa berusaha untuk mewujudkannya. perkembangan jasmani dan rohani untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang mampu mencapai tujuan ini dituntut untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perkembangan anak sejak dini menjadi perhatian yang sangat penting, anak harus diberi pendidikan supaya memiliki kemampuan untuk berkompetisi di dunia internasional. Menteri Hukum dan Kemanusiaan Republik Indonesia (Menhumkam) mencanangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014) pada 17 Oktober 2014 setelah Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani menjadi undang-undang pada 17 Oktober 2014. Hak Amir Syamsudin. UU tersebut merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menyebutkan bahwa anak yaitu siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, meskipun masih dalam kandungan. Sebagai misi dan anugerah dari Tuhan, anak harus dilindungi karena mereka adalah manusia seutuhnya yang tak bisa dibatasi lebih lagi disakiti atau dilanggar oleh pihak manapun.

Pada prinsipnya, setiap anak, termasuk pengamen jalanan dan pengamen, memiliki hak dan hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Beberapa aspek

menyebabkan seorang anak yang seharusnya ada dalam asuhan orang tuanya ataupun walinya ditugasi mencari nafkah sehari-hari. Menurut Lufthi (2000), Dalam skala terbatas, anak- anak berbeda dari orang dewasa dalam pemikiran, sikap, perasaan, dan minat mereka. Karena generasi muda bertugas mengemban cita-cita bangsa, maka ia memiliki peran penting dan memiliki keunikan tersendiri yang harus dilindungi jika negara ini ingin tetap eksis di masa depan. Pasal 4 UU Perlindungan Anak mengatakan bahwasanya semua anak memiliki hak atas kehidupan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk hak untuk hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi.

Anak yang “miskin dan terlantar” oleh orang tuanya dilindungi oleh UUD 1945, yang dalam pembukaannya mengatakan bahwasanya “terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia” melindungi mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 dokumen tersebut. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa negara merawat semua anak yang miskin dan terlantar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua orang yang dekat dengan anak-anak harus berkontribusi pada kesejahteraan mereka yang miskin dan bergantung pada pendapatan jalanan untuk menyelesaikan masalah ini.

Anak jalanan ataupun yang kerap disingkat dengan anjal merupakan cerminan dari anak-anak yang kesehariannya melakukan aktivitas di jalanan mudah, ditemui dan yang kehadirannya dapat ditemui di setiap sudut kota atau sekitarnya, seperti di Kabupaten Gowa. Mereka relatif masih muda serta semestinya masih di tahapan belajar juga pengalaman belajar, mereka tidak boleh hidup seperti anak jalanan. Segala upaya yang dilakukan demi upaya pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan anak yang menjadi

korban penelantaran, eksploitasi, ataupun kekerasan, serta membeir jaminan pada keberlangsungan hidupnya juga perkembangannya pada tingkat emosional, fisik, dan mental pada tingkat sosial, termasuk dalam definisi tersebut. dari perlindungan anak.

Faktanya tidak semua anak-anak diberikan kebebasan atau kebutuhan yang mereka inginkan dan tidak semua anak bersenang-senang. Pasalnya, masih banyak anak yang memiliki peran ganda dan dibebani pekerjaan di usia 14-16 tahun untuk mencari nafkah jalanan sebagai pilihan hidupnya . Situasi ini dapat memicu kasus anak jalanan yang terus-menerus menjadi pusat perhatian atau pusat masalah yang tak berkesudahan.

Instansi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat disingkat LSM di Kabupaten Gowa perlu memberikan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak sarana untuk melindungi anak jalanan untuk melindungi anak jalanan, baik secara fisik danmental. Pasal 55 ayat 1 UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan pengasuhan dan pendidikan anjal, baik di dalam ataupun luar institusi, kemudian di Pasal 4 disebutjab bahwa semua anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, serta berpartisipasi menurut harkat serta martabat kemanusiaannya, dan dilindungi dari diskriminasi juga kekerasan. Salah satu aspek yang paling mengganggu dari proses modernisasi adalah meningkatnya jumlah anak jalanan dan pengamen, serta krisis perekonomian yang tidak juga reda, menyebabkan angka Anjal serta pengamen semakin bertambah. seorang pemain di udara terbuka. Anjal serta anak putus sekolah makin menjamur, namun ada juga masalah sosial baru yang memprihatinkan, selain ketakutan masyarakat terhadap mereka.

Abraham Faggidae dalam tesisnya membahas mengenai kompleksitas permasalahan sosial dari Anjal. Tak hanya permasalahan serta tantangan sebagai masyarakat perkotaan, keberadaan Anjal terkait juga dengan permasalahan urbanisasi, kurangnya keterampilan dan lain-lain, ia juga mengatakan bahwa anak jalanan melanjutkan aktivitas dan pekerjaannya melalui keinginan yang besar untuk mencari nafkah. . Pendapatan. dan setidaknya orang tuanya membebaskannya dari mencari nafkah dengan nongkrong di jalanan atau di tempat lain.

Pesatnya perkembangan Kabupaten Gowa membuat keramaian. Dengan banyaknya pusat-pusat keramaian, berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan sosial di dekat pusat-pusat keramaian misalnya supermarket, terminal, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Anjal serta pengamen menjadi permasalahan daerah yang memerlukan pendekatan yang sistematis, terkoordinasi dan integral yang pelaksanaannya harus dicapai secara sinergis antara pemerintah dan non pemerintah. Karena kehadirannya, anak jalanan juga bisa berbahaya bagi dirinya sendiri juga orang lain, mengganggu jalan umum serta rawan mengalami eksploitasi juga kejahatan.

Selain anak jalanan, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan kota yang pesat menjadi daya tarik bagi masyarakat lain yang memiliki masalah ketimpangan sosial, dalam hal ini seniman jalanan. Penyanyi adalah individu atau kelompok yang memiliki apresiasi yang mendalam terhadap seni dan tampil dengan tujuan agar karyanya dapat dinikmati oleh publik. Sebagai imbalannya, masyarakat dapat menawarkan layanan atau penghargaan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. tentunya di berbagai kota besar karena

bermacam faktor. Permasalahan sosial anak jalanan serta pengamen adalah permasalahan yang amat kompleks sebab meliputi bermacam aspek seperti aspek keamanan, ekonomi, hukum, psikologi, budaya, serta sosial. Isu anak-anak tunawisma dan artis keliling terus menjadi beban kemajuan negara. Karena itu, sangat penting bahwa negara dan masyarakat bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Di Kabupaten Gowa sendiri kemunculan anak jalanan dan pengamen dapat dijumpai di tempat-tempat umum seperti di Perbatasan Gowa-Makassar(Jl.Sultan Alauddin), SPBU Andi Tonro Gowa,Samping Taman Hasanuddin Gowa serta di jalan-jalan protokol Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa sendiri sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) No. 05 Tahun 2014 Penyelenggaraan Perlindungan Anak.Tetapi, kebijakan tersebut tidak spesifik menjelaskan terkait penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan dan pengamen.

Berdasarkan pengamatan dan pemantauan awal di Jalan Protokol Kabupaten Gowa tepatnya di jalan Sultan Alauddin (Perbatasan Gowa-Makassar) penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa belum masifnya penertiban atau patroli anak jalanan maupun pengamen yang dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial Gowa sehingga masih maraknya anak jalanan dan pengamen dilokasi tersebut serta dari ditemukan beberapa artikel –artikel berita dijelaskan bahwasanya penertiban anak jalanan dan pengamen oleh dinas sosial memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu banyak anak jalanan atau pengamen ketika dilakukan penertiban dilapangan mereka berlarian atau menyebrang di kawasan yang berada diwilayah makassar sehingga Dinas sosial kabupaten Gowa tidak mempunyai kewenangan untuk menertiban anak jalanan atau pengamen tersebut serta tertutupan atau tidak ada akses informasi pihak birokrat terkait payung hukum ataupun rujukan yang dilaksanakan Dinas Sosial Gowa menyangkut permasalahan anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa, sehingga peneliti kurang mendapatkan informasi yang

menyeluruh terkait penertiban . Oleh karena itu, berdasarkan premis-premis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:“**Evaluasi Peran Dinas Sosial Gowa Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen Di Kabupaten Gowa**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dibahas pada penelitian ini ditujukan untuk memberi batas topik yang akan dibahas. Dengan adanya batasan masalah yang digunakan dapat menghindari pelebaran atau penyimpangan agar masalah yang akan diteliti lebih terarah serta memudahkan sehingga tujuan awal yang telah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, batasan masalah yang dipergunakan menjadi satu diantara tolok ukur untuk melihat bagaimana evaluasi penertiban yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Gowa terhadap anak jalanan dan pengamen . Menurut Sudarsonono (1995) ada 6 jenis pengamen yaitu :

1. Pengamen Baik
2. Pengamen Tidak Baik
3. Pengamen Musisi
4. Pengamen Pemalak
5. Pengamen Kriminal
6. Pengamen Cilik/Anak-Anak

Menurut Surbakti dkk. (1997:59), didasarkan pada hasil kajian dilapangan, secara garis besarnya anak jalanan dikelompokkan menjadi 3, yakni :

1. Children On The Street
2. Children Of The Street
3. Children From Families Of The Street

Adapun fokus penelitian ini hanya tertuju pada **Children On The Street** sertra **Children Of The Street** juga **Pengamen Cilik/Anak-anak** karena pada judul ini mengangkat terkait perlindungan anak yang dimana Pasal 4 UU Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa semua anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, serta berpartisipasi menurut harkat serta martabat kemanusiaannya, juga dilindungi dari diskriminasi serta kekerasan. Adapun fokus kajian terkait belum masifnya penertiban atau patroli anak jalanan maupun pengamen yang dijalankan oleh aparat Dinas Sosial Gowa karena sesuai observasi awal peneliti yang terjun ke lapangan masih maraknya anak jalanan dan pengamen di lokasi tersebut serta dari ditemukan beberapa artikel –artikel berita dijelaskan bahwasanya penertiban anak jalanan dan pengamen oleh dinas sosial memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu banyak anak jalanan atau pengamen ketika dilakukan penertiban dilapangan mereka berlarian atau menyebrang di kawasan yang berada di wilayah makassar sehingga Dinas sosial kabupaten Gowa tidak mempunyai kewenangan untuk menertiban anak jalanan atau pengamen tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Gowa Dalam Penertiban Anak Jalanan dan Pengamen di Kabupaten Gowa ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen ?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya dalam studi administrasi negara, khususnya di bidang administrasi yang berkaitan langsung dengan evaluasi kebijakan publik.

b. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut bagi pihak yang berkepentingan dan pemerhati anak jalanan dan pengamen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. . Konsep Evaluasi

1.1 Pengertian Evaluasi

"Evaluasi" adalah kata bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi "penilaian." Itu penilaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mengevaluasi adalah metode untuk menentukan kelayakan suatu subjek atau fenomena dengan membandingkannya dengan sumber lain dan menetapkan tujuan. Pengukuran dapat bersifat netral, positif atau negatif, atau kombinasi keduanya. Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Concepts of Administration and Administration in Indonesia*, ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses membandingkan standar dengan fakta dan menganalisis hasilnya (Ndarara, 1989: 201).

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penerapan berbagai skala nilai pada hasil kebijakan dan program. Mengevaluasi hasil kebijakan dalam hal unit nilainya secara umum adalah istilah yang dapat disamakan dengan evaluasi atau pengakuan. Evaluasi sangat penting untuk tujuan jangka panjang dan untuk mendukung suatu program. Dengan evaluasi, strategi masa depan akan lebih baik dan tidak akan mengurangi kesalahan serupa atau sebanding. Berikut ini adalah alasan perlunya evaluasi:

- A. Mengetahui tingkat kelayakan suatu strategi atau kebijakan, yakni sejauh mana strategi tersebut mencapai tujuannya

B. Pemenuhan sebagian tanggung jawab publik dengan mengevaluasi kinerja suatu program atau strategi dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai pemilik aset dan penerima manfaat dari kebijakan program pemerintah.

C. Tunjukkan kepada Pemangku Kepentingan Manfaat Program atau Strategi Jika penilaian strategi tidak dilakukan, para pemangku kepentingan, terutama khalayak sasaran, tidak yakin akan manfaat suatu strategi atau program.

Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terakhir, evaluasi kebijakan berguna dalam memberikan kontribusi bagi proses pembuatan kebijakan di masa depan sehingga kesalahan yang sama tidak terulang. Di sisi lain, diharapkan hasil evaluasi ini akan mengarah pada kebijakan yang lebih baik.

Meskipun evaluasi sangat diperlukan, namun tahap evaluasi seringkali kurang mendapat perhatian, baik dari pelaksana maupun pemangku kepentingan lainnya. suatu program seringkali hanya berakhir pada tahap implementasi, tanpa diikuti oleh tahap evaluasi. Berikut hambatan dalam melakukan evaluasi:

- 1) **Kerusakan Mental:** Banyak agen yang masih alergi terhadap keramaian atau kegiatan evaluasi karena dilihat dalam konteks kinerjanya.
- 2) **Pembatasan dana.** Kegiatan evaluasi membutuhkan anggaran yang besar, seperti anggaran untuk pengumpulan dan pengolahan data, anggaran untuk staf administrasi, dan anggaran untuk evaluator. Tanpa dukungan dana, proses evaluasi akan menemui kendala.

- 3) **Keterbatasan teknis.** Pemeriksa terus-menerus dihadapkan pada masalah kurangnya statistik atau petunjuk terbaru
- 4) **Kendala politik.** Evaluasi sering terhambat karena alasan politik bahkan gagal.
- 5) **Tidak ada evaluator.** Beberapa lembaga publik kekurangan staf yang kompeten untuk melakukan evaluasi. Memang budaya evaluasi belum tercipta, sehingga pemerintah belum memiliki program yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki keterampilan evaluasi.

1.2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi atau penilaian memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan prosedur, jadwal dan kegiatan.
- Mengukur keberhasilan suatu program, meliputi metode yang digunakan, penggunaan fasilitas dan pencapaian tujuan
- Evaluasi membantu memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran

1.3 Tujuan Evaluasi

Untuk memenuhi tujuan evaluasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi.

Wirawan (2012: 22-23), dalam bukunya membahas beberapa tujuan evaluasi, antara lain:

- menentukan dampak sosial program

- Periksa program untuk melihat apakah itu sedang dilakukan sebagaimana dimaksud.
- menentukan apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- Untuk menentukan aspek mana dari suatu program yang berjalan, perlu dilakukan evaluasi..
- Sebagai feedback dan informasi penting untuk melakukan evaluasi dalam memperbaiki kemerosotan serta bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau menghadapi masalah di kemudian hari
- Mengukur dampak dari program apapun, baik itu positif maupun negatif
- Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency(efektivitas biaya dan efisiensi biaya)

1.4 Tahapan Evaluasi

Secara umum evaluasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

A. Evaluasi pada tingkat awal

Jika program tidak dijalankan, evaluasi selesai. Putuskan seberapa penting setiap alternatif dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Evaluasi pada tingkat implementasi program

Lihat bagaimana program benar-benar dijalankan. Menentukan kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya.

C. Evaluasi di akhir program

Evaluasi program di akhir. Hal ini untuk memverifikasi bahwa kinerja program mampu memecahkan masalah yang akan diajukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja program.

Ada tiga jenis dasar evaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Hal-hal yang disebutkan di atas meliputi:

- 1) **evaluasi kesesuaian**, bertujuan untuk menguji dan menilai apakah kebijakan saat ini dapat diimplementasikan dan apakah diperlukan kebijakan baru untuk menggantikannya.
- 2) **Evaluasi efektivitas**, Program kebijakan harus dievaluasi untuk melihat apakah menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diinginkan, apakah memenuhi tujuannya, dan apakah hasil yang diharapkan sepadan dengan upayanya Untuk menguji sistem sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dari setiap kebijakan publik , jenis evaluasi ini bertujuan untuk melakukan hal itu.
- 3) **Evaluasi efektivitas**, atas dasar pertimbangan moneter Menggunakan dana publik untuk mencapai dampak kebijakan sangat efisien ketika input yang digunakan telah menghasilkan hasil yang setara dengan yang diperoleh melalui kebijakan itu sendiri.

1.5 Indikator Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan satu rangkaian aktivitas yang dirancang untuk melacak kemajuan sebuah program. Indikator evaluasi program digunakan demi mencari tahu berhasil tidaknya perumusan suatu program. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilan terpenuhi; namun, dapat dikatakan bahwa suatu program telah gagal atau belum sesuai jika indikator keberhasilan belum terpenuhi. Untuk menentukan program dan menilai efektivitasnya, indikator harus ditetapkan. Indikator evaluasi program dapat dikaitkan langsung dengan proses dan hasil akhir. Yang terpenting adalah indikator keberhasilan dapat diukur dan dirumuskan secara jelas dan operasional. Listya (2010) mengutip Purba (2005) yang mengatakan bahwa kesesuaian aktor yang terlibat, kecukupan bentuk infrastruktur, dan pemantauan pengembangan sistem merupakan indikator keberhasilan evaluasi program. Adapun indikator evaluasi dari Dunn (2000:30) sebagai berikut:

- 1) Efektivitas adalah apakah hasil yang diharapkan sudah dicapai
- 2) Kecukupan adalah sejauh mana hasil yang diperoleh bisa mengatasi persoalan
- 3) Implementasi, pertanyaan apakah biaya serta manfaat dapat terdistribusi secara adil di antara kelompok orang yang berbeda
- 4) Akuntabilitas, jika hasil prosedur mengandung preferensi/nilai yang dapat membuat mereka bahagia, dan
- 5) Penentuan kegunaan guna memperoleh hasil yang berharga

teori model evaluasi Context, Input, Process, Product atau yang dingkat CIPP yang dipakai penulis dalam penelitian ini. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985), model evaluasi CIPP telah terbukti menjadi pendekatan evaluasi berorientasi keputusan untuk mendukung administrator atau pengambil keputusan. Model penilaian CIPP akan menjadi lebih luas saat diterapkan. Karena model evaluasi ini lebih menyeluruh dibandingkan model evaluasi lainnya. Stufflebeam memaparkan bahwa hasil evaluasi akan memberi alternatif solusi bagi pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari empat komponen yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian/Evaluasi konteks

Penilaian konteks, juga dikenal sebagai evaluasi konteks, adalah proses mengidentifikasi dan menangani masalah dengan program atau serangkaian kondisi. Ini mencakup rincian poin baik dan buruk objek tertentu. Dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin, penilaian kontekstual adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan sekitar untuk kebutuhan yang belum terpenuhi, orang-orang yang dilayani oleh proyek dan sampelnya, serta tujuannya.

2. Evaluasi masukan

Tahap kedua model CIPP melibatkan penilaian masukan. Ini adalah proses menilai input untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tujuan pemrograman. Penilaian masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber daya alternatif apa yang telah diadopsi, rencana dan strategi apa yang ada untuk mencapai tujuan dan

prosedur kerja apa yang ada untuk mencapainya, jelas Eko Putro Widyoko. Komponen evaluasi masukan disertakan. Sumber daya manusia

- Sarana dan Prasarana yang mendukung
- Dana Anggaran
- Prosedur dan Aturan yang diperlukan

Menurut Stufflebeam yang dikutip Suharsimi Arikunto, masalah terkait masukan terbukti mengarah pada penyelesaian masalah yang mendorong terlaksananya program dimaksud

3. Evaluasi proses

Evaluasi proses digunakan untuk mengidentifikasi atau memprediksi desain atau proses implementasi, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan suatu program, dan berfungsi sebagai catatan atau arsip dari proses yang telah terjadi. Proses evaluasi memerlukan pengumpulan data evaluasi yang telah ditetapkan dan digunakan dalam praktek pelaksanaan program. Dengan kata lain, bagaimana tugas diselesaikan dan apa yang perlu diperbaiki adalah dua detail yang perlu disebutkan

4. Evaluasi Hasil/Buatan

Merupakan evaluasi terhadap hasil yang berlangsung dalam rangka mengkaji kinerja suatu program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam fase evaluasi ini, seorang evaluator dapat menentukan apakah suatu program tertentu dapat dilanjutkan, diperluas, atau bahkan dibatalkan.

B. DINAS SOSIAL

2.1 Dinas Sosial

Tindakan lembaga negara seringkali selalu menjadi perhatian publik, terlebih setelah munculnya iklim yang lebih demokratis muncul dalam cara hidup masyarakat. Layanan pemerintah dipandang sebagai pemborosan waktu dan uang oleh banyak warga negara; meskipun sebagian besar anggaran mereka digunakan untuk membangun negara, tampaknya masyarakat tidak puas dengan layanan dan barang pemerintah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Kesejahteraan menyatakan:

- a. Kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara perlu dipastikan terpenuhi jika mereka ingin dapat memenuhi peran sosialnya dan tumbuh sebagai individu.
- b. Pemerintah, organisasi daerah, dan organisasi masyarakat bekerja sama memberikan pelayanan sosial kepada warga negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk rehabilitasi sosial dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.
- c. Pekerja sosial adalah seseorang dengan pendidikan dan pelatihan formal di bidang pekerjaan sosial yang dipekerjakan oleh organisasi publik atau swasta yang berfokus pada layanan sosial dan masalah kesejahteraan.

Pasal 3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 bertujuan:

- Menaikan derajat kualitas kelangsungan hidup dan taraf kesejahteraan
- Mengembalikan peran sosial untuk memperoleh kemandirian.
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial.
- Meningkatkan kedudukan, tanggung jawab dan kepedulian sosial guna menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan dan kelembagaan di dunia usaha
- Membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kesejahteraan sosial secara terlembaga dan berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan sosial.

Pekerjaan sosial menaruh perhatian besar terhadap permasalahan anak, termasuk, anak jalanan yang membutuhkan perlindungan khusus. Besarnya perhatian perkerjaan sosial terhadap anak jalanan tersebut, didasarkan pada pandangan, bahwa anak merupakan asset bagi kelangsungan cita-cita dan pembangunan suatu bangsa di manapun. Anak adalah sumber daya manusia masa depan bagi setiap bangsa, yang memerlukan perlindungan atas hak-hak mereka dan pemenuhan kebutuhannya, baik fisik, mental spiritual, emosional dan sosial.

Sebagai penyelenggara negara, Dinas Sosial diangkat oleh pejabat yang berwenang dari Departemen Sosial pada instansi lain untuk melaksanakan segala kegiatan bantuan sosial yang esensial (Pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 1988). Akibatnya, jabatan sebagai pekerja sosial hanya bisa diisi oleh pegawai pemerintah. Peran pekerja

sosial adalah untuk memandu upaya perlindungan sosial, baik dalam bentuk promosi perlindungan sosial dan pengembangan perlindungan sosial, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang perlindungan sosial. .

2. 2 Peran Dinas Sosial (DINSOS)

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial bertindak sebagai:

a. Untuk Motivator

Yaitu memberikan informasi, nasehat dan dorongan kepada keluarga dan masyarakat untuk bersedia, antusias dan bertekad untuk mencegah dan memecahkan masalah sosial.

b. Dinamis

Berarti menggerakkan keluarga atau komunitas individu untuk dapat secara mandiri mengidentifikasi dan memanfaatkan semua sumber daya dan peluang sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial tertinggi.

c. Pelaksana

Yaitu pelaksanaan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan umum pada khususnya dan pembangunan negara pada umumnya. Dalam mengemban jabatan tersebut, setiap pekerja sosial menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial sesuai dengan nilai dan standar kepribadian orang tersebut. Setiap fungsi individu atau kolektif dilaksanakan secara terlembaga dan terorganisir serta merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pembangunan di bidang perlindungan sosial.

Dinas sosial adalah penyelenggara negara yang berkewajiban menyelenggarakan tugas negara di bidang bantuan atau kesejahteraan sosial. Misi utama departemen sosial dan sumber daya manusia adalah untuk melaksanakan misi rumah tangga dan bantuan regional di bidang Pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pembinaanpekerja sosial Dinas Sosial dalam melaksnakan tugas pokoknya memiliki beberapa fungsi antara lain :

- Perumusan kebijakan Sosial
- Terwujudnya urusan publik dan pelayanan publik di bidang social
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan

Pemenuhan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan mengharuskan Dinas Sosial menyusun rencana strategis yang menjabarkan maksud dan tujuan pelaksanaan proses yang berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan. Rencana strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, serta kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang sehingga di masa mendatang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk lebih memahami peran Sektor Jaminan Sosial dan Rehabilitasi, simak penjelasan berikut ini.

- Merencanakan dan melaksanakan program kerja jaminan sosial dan rehabilitasi sejak konsepsi sampai dengan selesai.
- Pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan tim kerja kantor.
- Mengikuti prinsip full work grouping, mendelegasikan dan mengendalikan tugas bawahan sesuai dengan peran dan kemampuannya.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh informasi, bimbingan, dan pengkajian masalah untuk hasil yang ideal.
- melaksanakan kegiatan di bidang rehabilitatif dan kesejahteraan;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menetapkan masa percobaan untuk pekerjaan operasional di bidang jaminan sosial.
- Program jaminan sosial dan rehabilitasi dipantau untuk memenuhi tujuan kerja.
- Mengevaluasi dan mengarahkan pekerjaan bawahan melalui evaluasi bawahan.
- Pengembangan Kebijakan harus diberitahu tentang pemikiran dan komentar Anda dan diberi waktu untuk mempertimbangkannya.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
- Lakukan tugas yang diberikan oleh atasan Anda.

C. Definisi dan Konsep anak jalanan dan Pengamen

3.1 Pengertian Anak Jalanan

Jika anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, maka termasuk anak dalam kandungan. Mereka yang belum mencapai usia dewasa atau yang belum mencapai pubertas disebut sebagai anak-anak. Dalam psikologi, periode antara masa bayi dan usia lima atau enam tahun disebut sebagai "tahun-tahun masa kanak-kanak", di mana selama itu perkembangan anak mengikuti pola yang serupa dengan siswa sekolah dasar. Anak-anak dalam pengertian sosial ini lebih terfokus pada pelestarian alam karena keterbatasan yang mereka miliki Faktor keterbatasan daya tampung yaitu Anak tumbuh belum dewasa sehingga mengakibatkan kemampuan berpikir dan kondisi fisik untuk pertumbuhan mental dan spiritualnya lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa.

“Seseorang yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin selama dalam pengawasan orang tuanya dan wasiatnya tidak ditarik kembali” demikian bunyi Pasal 47 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana Seorang anak". Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 04 Tahun 1974 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun yang belum kawin dan belum pernah berhubungan seks. Sementara undang-undang nasional dapat menetapkan batasan usia yang berbeda untuk anak-anak, CRC mengakui bahwa anak-anak dapat didefinisikan sebagai mereka yang umumnya berusia kurang dari 18 tahun. Terbitan 23 Tahun 2002 (UUPA) Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum lahir.

3.2 Pengelompokan Anak Jalanan

Anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau berkeliaran di jalanan Indonesia dianggap sebagai "anak jalanan" oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial negara tersebut. Anak jalanan biasanya berusia antara 5 dan 18 tahun, aktif atau berkeliaran di jalan, dan mengenakan pakaian lusuh dan alas kaki berkualitas rendah. Anak jalanan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Children On the street

Anak-anak yang bekerja di jalanan tetapi memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga mereka atau mampu mendukung mereka secara finansial. Karena orang tua mereka sendiri tidak mampu mengurangi tekanan kemiskinan, mereka harus mengalihkan sebagian pendapatan mereka ke kategori ini untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Inilah ciri-ciri anak-anak dalam kelompok ini.

- a) Ia memiliki hubungan yang tidak teratur dengan anak-anaknya. keluarga, yang diulang secara teratur, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak selalu, biasanya mereka datang dari luar kota untuk bekerja di jalanan
- b) 8-12 jam berada di jalanan dan kadang-kadang 16 jam
- c) usia rata-rata kurang dari 16 tahun
- d) Tidak bersekolah lagi

2. *Children of The Street*

Kaum muda berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi jalanan. Masih ada beberapa dari mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuamereka, tetapi arus perjumpaan mereka tidak menentu. Banyak dari mereka adalah anak di bawah umur yang dibebaskan yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena berbagai alasan. Menurut penelitian, anak-anak dalam kelompok ini sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan emosional serta seksual. Beberapa karakteristik anak-anak dalam kelompok usia ini adalah sebagai berikut:

- a) Usia rata-rata kurang dari 14 tahun
- b) Berada di jalan sepanjang hari dan menghabiskan waktu 8-10 jam
- c) Hidup di jalanan dan tidur di sembarang tempat
- d) berpisah dengan orang tua minimal setahun sekali atau lama tidak terlihat

3. *Children From Family Of The Street*

Hidup mereka terus bergerak, dengan semua risiko yang menyertainya. Anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang terpaksa hidup di jalanan. Mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat, tetapi hidup mereka terlempar dari satu tempat ketempat lain dengan segala keunikannya. Kemampuan kelompok ini untuk hidup di jalanan sejak mereka masih bayi, atau bahkan saat masih dalam kandungan ibu mereka, adalah salah satu ciri khas mereka. Di Indonesia, kategori ini dapat ditemukan di bawah jembatan, di rumah-rumah liar di sepanjang jalur kereta api, dan

di tepi sungai, tetapi angka kuantitatif yang tepat belum diketahui. Anak-anak kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berada di jalan sekitar 4 - 6 jam
- b) Setiap hari bertemu dengan orang tuanya
- c) Tinggal bersama orang tua atau walinya
- d) Rata-rata berumur kurang dari 14 tahun

3.3 Faktor – Faktor Pemicu Anak Jalanan

Kementerian Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia atau lebih disingkat Kemensos RI menjelaskan ada tiga jenis faktor adanya anak jalanan, yaitu *pertama*, faktor tingkat mikro (penyebab langsung), *kedua*, faktor tingkat meso (penyebab bawah sadar) dan *terakhir* faktor tingkat makro (penyebab dasar).

1. Tingkat mikro (penyebab langsung)

Ketika kita berbicara tentang "faktor mikro", kita berbicara tentang hal-hal seperti anak-anak dalam keluarga atau lingkungan. Menurut Departemen Sosial (2001:25- 26), anak dan keluarga dapat mengidentifikasi berbagai penyebab, antara lain kabur dari rumah, diajak bekerja karena sekolah atau putus sekolah, bertualang, bermain game, atau mengundang teman. Anak menghadapi kesulitan fisik, psikologis, dan sosial sebagai akibat dari pengabaian orang tua, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, penolakan orang tua, kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan perpisahan orang tua. Perubahan nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan

pembangunan pemerintah turut menyebabkan melemahnya keluarga besar. Adalah umum bagi anak-anak untuk mencari kemandirian mereka sendiri ketika orang tua mereka tidak dapat lagi memahami situasi dan harapan mereka.

2. Tingkat meso (penyebab yang mendasari)

Pada tingkat ini, variabel-variabelnya adalah yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Odi Shalahudin (2001: 25-26) menyatakan bahwa berikut ini adalah akar penyebab di tingkat meso (kelompok): Anak-anak diajari untuk bekerja karena mereka adalah aset berharga dalam keluarga berpenghasilan rendah, yang menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran. Akibat urbanisasi, anak-anak mengembangkan kebiasaan penolakan masyarakat dan persepsi anak jalanan sebagai penjahat potensial, yang kemudian mereka bawa hingga dewasa.

3. Tingkat makro (Penyebab Dasar)

Faktor struktural dasar disebut sebagai Faktor Tingkat Makro (basic level). Seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Sosial RI, (2001:25-26), penyebab tingkat makro adalah sebagai berikut: Selama ada pekerjaan non-modal di sektor informal, kita punya ekonomi. Kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan yang menyebabkan urbanisasi pedesaan. Akibatnya, anak-anak mereka menemukan diri mereka di jalan. Semakin tidak efektif untuk mengusir keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka atas dasar "untuk pembangunan" karena kebijakan ekonomi makro pemerintah, yang berdampak pada lebih sedikit orang. Pendidikan diprioritaskan daripada kesempatan belajar karena biaya yang terkait dengannya, perilaku guru yang diskriminatif, dan persyaratan teknis dan biokratis

3.4 Kategori Anak Jalanan

Adapun kelompok-kelompok anak jalanan ialah:

1. Anak-anak yang dipekerjakan secara teratur yang memelihara hubungan dekat dengan keluarga mereka. Dalam kelompok ini, anak jalanan dibagi menjadi dua kategori: mereka yang tinggal serumah dengan orang tuanya dan masih dapat mengunjungi mereka setiap hari, dan mereka yang bekerja dan tinggal di jalanan tetapi masih dapat mengunjungi mereka. jam kerja reguler atau non-standar
2. Anak-anak yang sering absen dan tidak memiliki orang tua atau keluarga, atau yang terlantar.
3. Anak jalanan biasanya berasal dari keluarga yang tunawisma atau memiliki konsentrasi tinggi orang yang tinggal di jalanan.
4. Dengan risiko menjadi pekerja jalanan dan/atau bekerja dan hidup di jalanan, anak-anak berusia lima hingga delapan belas tahun menghabiskan sebagian besar waktu bangun mereka untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Ketika situasi keuangan keluarga menghalangi seorang anak untuk mencapai impiannya, dia mungkin akan beralih ke pekerjaan sampingan seperti menyanyi di jalanan untuk menambah uang saku mereka yang sedikit.

“Karakteristik anak jalanan meliputi ciri fisik dan psikis,” kata Dwi Astuti, Menteri Sosial RI. Rambut merah, pakaian tidak rapi, dan kulit kusam hanyalah beberapa ciri fisik. Individu dengan kepribadian ini cenderung sangat mudah beradaptasi, tidak peduli dengan pendapat dan perasaan orang lain (bahkan jika mereka mungkin

curiga), tangguh, banyak akal, inovatif, dan mandiri. Indikator anak jalanan antara lain dijelaskan lebih rinci.

- Usia anak-anak berkisar antara 6 hingga 18 tahu
- Sejah mana Anda menghargai hubungan Anda dengan kerabat Anda
- Perjalanan harian lebih dari empat jam
- Pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman kota, tempat nongkrong PSK, perempatan jalan raya, pusat perbelanjaan, dan angkutan umum (penyanyi) hanyalah beberapa tempat nongkrong anak jalanan yang umum.
- Selain membersihkan sepatu dan berjualan, anak jalanan melakukan berbagai kegiatan lain seperti menjual koran dan majalah, membersihkan mobil, dan mencucikendaraan. Mereka juga dikenal sebagai "kuli", "pengamen", dan "penyewa payung"
- Masalah termasuk dieksploitasi secara seksual, terlibat dalam kecelakaan mobil, ditangkap oleh polisi, berkelahi dengan rekan-rekan mereka.

3.5 Definisi dan Konsep Pengamen

Pengamen Jalanan merupakan julukan untuk anak jalanan atau orang dewasa yang mencari penghasilan dengan menggunakan media musik. Pengamen dilihat sebagai mata pencaharian alternatif yang dapat mengurangi pengangguran, namun di sisi lain, aktivitas jalanan dipandang menjadi aktivitas mengemis semata karena mereka hanya dapat memperoleh uang melalui suara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengamen adalah musisi jalanan yang berkeliling mencari uang serta tidak memiliki tempat tetap untuk pertunjukan

Berikut ini adalah jenis dan tipe pengamen jalanan menurut Sudarsono, 1995), yaitu:

1. Pengamen baik

Pengamen yang baik adalah pengamen atau pekerja seni yang profesional dengan keterampilan musik yang dapat menghibur sebagian besar pendengarnya. Pendengar dihibur oleh para musisi jalanan yang baik, sehingga para pendengar tidak segan-segan memberikan uang receh atau uang banyak untuk musisi jalanan jenis ini.

2. Pengamen tidak Baik

Istilah "bad pengamen" mengacu pada penyanyi jalanan yang musiknya tidak terlalu menyenangkan, tetapi sebaliknya sopan dan tidak memaksa orang untuk memberi tip kepada mereka. Namun, ada juga yang menuduh atau mengkritik pendengar karena tidak mendapat imbalan atas waktunya.

3. Pengamen Musisi

Pengemis Musisi jalanan ini tidak memiliki musikalitas dalam hal bermusik atau

menyanyi. Dibanding menyanyi, mereka lebih suka mengemis karena hanya putus asa dan hanya berbekal belas kasihan orang lain

4. Pengamen Pernalak

Musisi jalanan jenis ini sebenarnya adalah musisi jalanan yang lebih suka menakut-nakuti pendengarnya, membuat mereka merasa lebih baik memberi uang daripada direcoki oleh musisi jalanan

5. Pengamen Kriminal

Yaitu, pengamen jalanan ini adalah pengamen jalanan yang tidak hanya berada diagkutan umum tetapi juga melakukan kejahatan lain seperti pencopetan, pencurian, dll.

6. Pengamen Cilik/Anak-anak

Yaitu pengamen jenis ini ada yang bagus dari genre ini, tapi ada juga yang tidak enak didengar. Bagaimanapun, pengamen jalanan seperti ini adalah anak-anak korban keadaan dan tidak bertanggung jawab

D. PENELITIAN TERDAHULU

Jika Anda mencari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, Anda dapat menemukannya di tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Menurut penelitian ini, peneliti dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai sumber data yang relevan, termasuk objek penelitian dan lokasi serta masalah yang diteliti. Beberapa penelitian telah direkomendasikan oleh penulis sebagai sumber informasi untuk penelitian penulis. Menurut penelitian penulis, berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berupa artikel jurnal.

1. Jurnal yang ditulis oleh Harsinar, mahasiswa PKN FIS Jurusan MSU, Mustaring, Dosen PPKn FIS dan Imam Suyitno, Dosen PPKn FIS MSU dengan judul “Pelaksanaan fungsi bakti sosial dalam perlindungan anak jalanan Makassar”. Demikian kata penelitian ini.
 - Upaya bakti sosial kota Makassar untuk perlindungan anak jalanan telah berjalan dengan baik dalam pengembangan pencegahan, yang meliputi pendataan, pengawasan, pemantauan dan pengawasan, sosialisasi dan kampanye dan pembinaan lebih lanjut melalui Perlindungan dan Pengendalian Shelter Anytime, First Approach, Problem Solving dan Pemahaman, Dukungan Sosial dan Orientasi.
 - Anak jalanan di Makassar dilindungi oleh dinas sosial karena faktor-faktor yang mendukung tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan perkembangannya dan tersedianya layanan masyarakat di Makassar. Hambatan Rehabilitasi sosial dan kurangnya sosialisasi tidak mendapat tempat di lingkungan sekitar.

- Nampaknya sosialisasi YKP2N tentang rehabilitasi anak jalanan di Makassar berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya kerjasama antara dinas sosial dan dinas terkait.
2. Jurnal berjudul “Kebijakan Pengelolaan Anak Jalanan di Kota Malang” yang ditulis oleh Dwi Susilowati, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan anak jalanan melalui model family centered intervensi juga harus dilaksanakan agar orang tua sadar dan berperan dalam mengontrol anaknya agar tidak menjadi anak jalanan. Selain itu, sebagian besar anak jalanan adalah usia sekolah, sehingga perlu adanya model pendidikan berbasis keterampilan bagi anak jalanan yang dapat digunakan anak ketika tidak lagi berada di jalanan sehingga dapat memberdayakan diri. Oleh karena itu, pengembangan usaha berbasis anak jalanan harus dicapai agar keterampilan yang ditanamkan pada anak jalanan dapat dilanjutkan dengan pembentukan usaha mandiri yang bekerjasama dengan pihak swasta atau masyarakat luas. Sehingga profitabilitas anak jalanan dapat ditingkatkan melalui upaya ini, mulai dari perolehan hingga pendistribusian produk yang dihasilkan.
 3. Jurnal yang di tulis oleh Ronawaty Anasiru “Implementasi Model Kebijakan Perlakuan Anak Jalanan Di Kota Makassar. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar mengacu pada empat pendekatan, antara lain perawatan panti asuhan, perawatan keluarga, perawatan masyarakat, dan pendekatan semi sosial di rumah.
 4. Tidak heran jika sebagian besar anak jalanan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, mengikuti kegiatan seperti musik jalanan dan berjualan koran karena orang

tua mereka tidak mampu menghidupi keluarganya secara finansial. Penelitian Immanuel (2008) menunjukkan bahwa sebagian besar anak jalanan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan berasal dari luar Kecamatan Medan Johor dan bekerja sesuai keinginan mereka karena orang tua tidak mampu menghidupi keluarga.

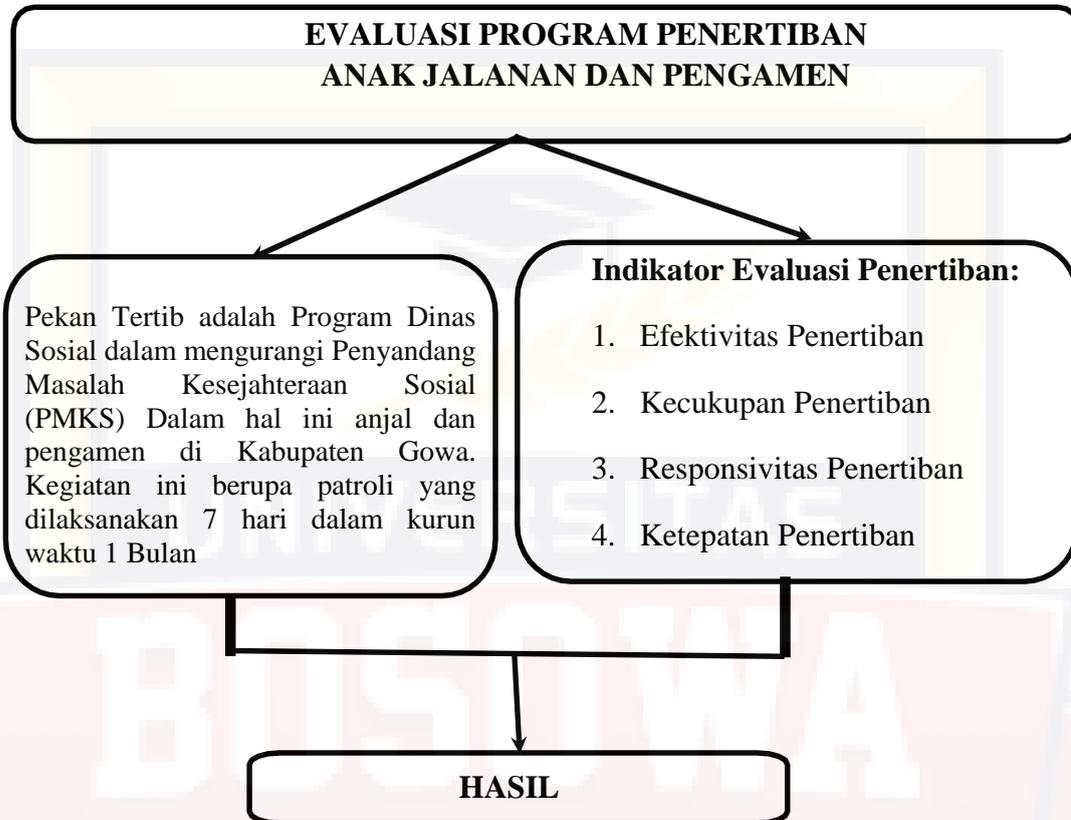


E. KERANGKA PIKIR

Kerangka berfikir yaitu uraian sementara dari gejala yang dijadikan objek sebuah penelitian didasarkan pada studi kepustakaan yang telah diapaparkan sebelumnya ataupun mengenai teori yang terkait pada beberapa aspek yang telah diidentifikasi dengan masalah yang penting (Sugiyono, 2009:91). Menurut Charles O. Jones, evaluasi adalah kegiatan yang didesain untuk mempertimbangkan kebermanfaatan dari program serta seluruh proses pemerintah. Kegiatan yang dirancang dalam kegiatan tersebut dapat menentukan apakah penyelenggaraan sebuah program sejalan dengan tujuan utamanya, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dianggap bergerak maju, harus diperbaiki atau harus dihentikan. Pengertian evaluasi itu sendiri ialah kegiatan mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi kerja suatu alat, metode atau orang, yang hasilnya akan menjadi parameter pengambilan keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Pengamen dan Anak Jalanan adalah seseorang atau kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak hidup menurut etika atau standar di lingkungan bermasyarakat, melakukan aktivitas di tempat umum atau di jalan, dan bahkan mencari uang dengan mengemis dari orang lain. Peristiwa atau fenomena ini bukanlah peristiwa yang asing bagi masyarakat, itu bahkan bagian dari kehidupan orang-orang di lingkungan itu. Anak Jalanan dan Pengamen sering terlihat di tempat ramai seperti perempatan, mall, SPBU, tempat hiburan, dan rumah makan di Kabupaten Gowa. Dinas Sosial Gowa memiliki peranan yaitu mengimplementasikan kebijakan atau program anak jalanan dan pengamen. Dalam hal ini implementasi kebijakan atau program harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar terealisasikan dengan baik.

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut maka bisa diuraikan alur penelitian ini dimana dalam penelitian ini terlihat bagaimana evaluasi program penertiban yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu Pekan Tertib dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi kejahatan anak dibawah umur.

Adapun indikator penertiban diantaranya :

1. Efektivitas Penertiban yakni apakah hasil yang diharapkan bisa dicapai. Pencapaian tujuan terkait pada rentang waktu dilaksanakannya suatu kebijakan. dasar hukumnya serta sasaran programnya
2. Kecukupan penertiban yaitu menjari tahu sejauh mana pencapaian tujuan yang diharapkan, sejauh mana pencapaian hasilnya bisa menuntaskan permasalahan yang terkait pada upaya memuaskan kebutuhan, nilai ataupun kesempatan.
3. Responsivitas Penertiban yaitu memberi jawaban, apakah hasil dari suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai berbagai kelompok tertentu. Sebuah kebijakan ataupun program dengan hasil yang dinilai sudah memberi kepuasan bagi berbagai kelompok tertentu artinya sudah berhasil untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh mereka
4. Ketepatan Penertiban yaitu suatu kebijakan yang diterapkan melalui berbagai program pada sejumlah kelompok sasaran harus dilakukan penilaian apakah hasil (tujuan) yang diharapkan sungguh-sungguh bernilai ataupun berguna.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi proyek penelitian adalah elemen penting dalam keseluruhan proses. Tujuan akhir sains adalah untuk memahami beberapa objek atau subjek, dan metode adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran sehinggadapat dikumpulkan data yang akurat, objektif, valid, dan reliabel.

Ada banyak cara berbeda untuk melakukan penelitian dan menemukan kebenaran. Dengan menggunakan standar yang objektif dan ilmiah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah keseluruhan proses penelitian atau penyelidikan karena digunakan untuk menafsirkan data dan menarik kesimpulan.

A. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS

❖ Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada bagaimana indikator evaluasi penertiban anak jalanan serta pengamen yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa

❖ Deskripsi Fokus

Orientasi penelitian ini hanya pada Evaluasi Peran Dinas Sosial terhadap penertiban anak jalanan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dibatasi agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas serta tak sesuai dengan inti masalah penelitian.

Pada penelitian ini, Evaluasi Peran Dinas Sosial adalah pengukuran kinerja evaluator dan keberhasilan suatu program untuk membantu mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa, apakah sudah baik atau belum. Program Dinas Sosial Gowa untuk melakukan penanganan terhadap anak jalanan dan pengamen yaitu :

1. Pekan Tertib

Kegiatan ini berupa patroli yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Gowa bekerja sama dengan Forum Tagana, Satpol PP serta Pekerja Sosial guna menindaklanjuti atau menertibkan masyarakat yang mengalami masalah sosial dalam hal ini anak jalanan dan pengamen di wilayah Kabupaten Gowa.

B. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian & Lokasi Penelitian

❖ Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif adalah apa yang kami lakukan di sini. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan yang melingkupi suatu fenomena tertentu dengan menyusun dan menganalisis sejumlah besar data. Penelitian lapangan akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang fakta dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan dengan cara yang memotivasi.

Penelitian kualitatif berkaitan dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial. Pengolahan data induktif digunakan sebagai pengganti pengolahan data statistik untuk menganalisis hasil penelitian ini.

❖ Pendekatan Penelitian

Saat melakukan penelitian, penting untuk diingat bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan bahwa hasil terbaik diperoleh ketika seluruh proses dipatuhi sedekat mungkin dari awal hingga akhir. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah penelitian, sangat penting untuk memilih metodologi yang tepat. Pendekatan kualitatif (pendekatan kualitatif) digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial dan keyakinan dan persepsi serta sikap individu dan kelompok (Burhan, 2003: 18).

Bagi Maelong, Bagdar dan Taylor (2011:4) menggambarkan metodologi kualitatif sebagai metode untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata orang dan tindakan mereka. Diharapkan dinas sosial di Kabupaten Gowa akan memainkan peran penting dalam pemolisian anak jalanan dan pengamen di bawah strategi ini.

❖ Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini akan terlaksana. Lokasi yang dipilih penulis adalah di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa bertempat di Jalan Tumanurung No.30 Sungguminasa, Gowa dan di perbatasan Gowa – Makassar (Jalan Sultan Alauddin)

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

❖ Data primer

Ketika kita berbicara tentang "data primer", kita berbicara tentang informasi yang dikumpulkan langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian di tempat pertama

❖ Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah disebut data sekunder

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian sangat bergantung pada data sebagai sumber informasi utama. Sehingga diperlukan metode pengumpulan data yang tepat. Penggunaan metode pengumpulan data yang salah akan mengakibatkan hasil yang tidak akurat, sehingga menyulitkan kami untuk menjelaskan temuan penelitian kami. Untuk memudahkan dalam menganalisis dan memahami, data akan diolah setelah dikumpulkan.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

- a. **Observasi**, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode agar bisa mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan secara langsung. Penulis menganggap metode ini efektif karena penulis bisa memastikan data yang diambil merupakan data yang akurat.
- b. **Wawancara**, merupakan metode yang dilakukan dengan proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dan informan baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Jenis wawancara pada penelitian ini ialah wawancara secara mendalam yaitu mengumpulkan informasi melalui tatap muka secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam
- c. **Dokumentasi**, menggunakan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, notulen rapat dan buku harian untuk mengumpulkan informasi. Pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian dimungkinkan melalui penggunaan dokumentasi. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dokumentasi ini telah dilengkapi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang akan digunakan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan penelitian. Saat melakukan penelitian, instrumen sangat penting. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Suatu peristiwa atau kegiatan digambarkan dalam bentuk data, yang merupakan kumpulan dari berbagai jenis informasi. Tidak mungkin peneliti mengumpulkan data tanpa metode yang tepat. Akibatnya, pada saat pengumpulan data, instrumen harus digunakan sebagai sarana untuk memastikan validitas dan akurasi data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai alat, termasuk ponsel, kamera, perekam suara, pena, dan catatan, untuk merekam hasil observasi, wawancara, pedoman wawancara, dan tinjauan pustaka.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang menjadi target untuk dilakukan penelitian. Untuk menetapkan informan penelitian, perlu memakai teknik menentukan sample, yang mana bisa dibedakan menjadi dua teknik yakni *Probability Sampling* serta *Nonprobability Sampling*. Oleh karena penelitian yang dilakukan memakai metode kualitatif maka digunakan salah satu teknik dari *Nonprobability Sampling* yaitu *Sampling Purposive* yang mana Sugiyono (2016) mendefinisikannya sebagai teknik menentukan sampel melalui pertimbangan tertentu, yakni berbagai karakteristik khusus yang disesuaikan pada tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu:

- ❖ Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Gowa
- ❖ Kassi Kessos Lansia & penyandang/ Pekerja Sosial Ahli Pertama
- ❖ Kassi Kessos Tuna Sosial / Pekerja Sosial Ahli Muda
- ❖ Anak Jalanan dan Pengamen Cilik

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data dalam proses pengolahan data. Penting bagi seorang peneliti untuk melacak apa yang terjadi di dunia di sekitar mereka. Bagi peneliti, pengumpulan dan analisis data bukan hanya perpanjangan alami satu sama lain; mereka juga tidak terpisahkan. Untuk memulai proses pengumpulan data, seseorang harus mengumpulkan semua informasi yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data, peneliti dapat memperoleh wawasan baru tentang kasus yang mereka pelajari dan membuatnya tersedia untuk umum sebagai informasi yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Metode deskriptif kualitatif analisis data digunakan dalam penelitian ini, yang berarti bahwa data yang dihasilkan dalam bentuk deskripsi tertulis atau lisan dari hal-hal yang diamati secara mendalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif *Miles dan Huberman* dalam (Sugiyono, 2016). Melalui pengumpulan data, penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. Display Data/ Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil makin mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alir penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis dan kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan melakukan verifikasi data.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat *Miles dan Huberman* dalam (Sugiyono, 2016) proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif secara bolak-

balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan penelitian verifikasi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sejarah pembangunan dan perkembangan dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan serta reformasi, wilayah pemerintahan kabupaten gowa berkembang dengan cukup pesat atau signifikan. Menjadi wilayah pertanian yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar. Kabupaten Gowa adalah wilayah pemukiman serta perumahan yang berbeda dengan Kota Makassar. Keadaan tersebut menjadikan Kabupaten Gowa yang tadinya adalah wilayah pertanian, berubah jadi pusat pengembangan pertanian serta tanaman pangan yang berpotensi besar juga menjadi pusat jasa serta ekonomi. Dari aspek geografis, Kabupaten Gowa ada terletak di garis Lintang $5^{\circ} 33'$ - $5^{\circ} 34'$ Selatan serta bujur $120^{\circ} 33'$ timur

Kabupaten Gowa dibagi menjadi 18 kecamatan 169 Kelurahan/Desa serta 726 Dusun. 18 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Somba Opu, Tinggimoncong, Manuju, Bontomarannu, Parigi, Parangloe, Pattalassang, Bajeng, Palangga, Bajeng Barat, Tombolo Pao, Tompobulu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Barombong, Biringbulu, Bungaya, dan Bontolempangan

Sejarah perkembangan Gowa melewati dua periode yang berbeda dari segi bentuk pemerintahan, yaitu periode kerajaan dan periode kemerdekaan, keduanya menjadi momentum sejarah yang mengandung makna dan sumber identitas dalam pemerintahan Gowa. Dari aspek geografisnya, Kabupaten Gowa terletak di garis bujur timur dan kutub utara timur. sementara wilayah administrasinya terletak diantara bujur timur 5° serta 5° lintang selatan. Terletak disebelah selatan provinsi Sulawesi Selatan, Gowa berbatasan dengan tujuh kota/kabupaten lainnya dengan batas sebagai berikut :

Selatan : Kabupaten Jeneponto serta Takalar
Timur : Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, serta Sinjai
Barat : Kabupaten Takalar serta Kota Makassar
Utara : Kabupaten Maros dan Kota Makassar

Topografi Wilayahnya yang paling luas ada di dataran tinggi (72,26%) serta selebihnya (27,74%) terdapat didaerah dataran rendah. Wilayah Kabupaten Gowa ini mempunyai enam gunung serta yang paling tinggi yaitu Gunung Bawakaraeng. Wilayah ini dilintasi oleh lima belas sungai, dan yang terpanjang adalah Sungai Jeneberang dengan wilayah tangkapan airnya mencapai 881 km² dan panjang 90 km yang menjadikannya salah satu sungai terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan serta Waduk Bili Bili dibangun pada pertemuannya dengan Sungai Jenelata. Kondisi alam tersebut menjadikan Gowa memiliki tanah yang subur serta kaya dengan mineral. Kecamatan dengan luas wilayah paling luas yaitu Kecamatan Dataran Tombolo Pao yang luasnya mencapai 13,37% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa atau 251,82 km². Sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil yaitu kecamatan Bajeng Barat dengan luas hanya 1,01% wilayah Kabupaten Gowa atau 19,04 km². 35,30% wilayah Kabupaten Gowa, memiliki kemiringan tanah lebih dari 40 derajat, tepatnya di Kecamatan Tompobulu, Bontolempangan, Bungaya, Tinggimoncong, serta Parangloe.

Dengan kondisi topografi wilayah yang mayoritas dataran tinggi, daerah Kabupaten Gowa lima belas sungai besar maupun kecil yang berpotensi besar untuk dijadikan sumber listrik serta irigasi. Dengan potensi sungai Jeneberang, bekerja sama dengan Jepang, Pemerintah Kabupaten Gowa membangun waduk Bili-Bili multiguna permukaan ± Km 2 yang bisa mensuplai air irigasi ± Ha, air bersih untuk dikonsumsi masyarakat Kabupaten Gowa juga Makassar tidak kurang dari m³ dan untuk Pembangkit listrik tenaga air 16,30 Mega Watt.

Tabel.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Bontonompo	21.964	23.146	45.110
2.	Bontonompo Selatan	15.458	16.275	31.733
3.	Bajeng	36.298	36.568	72.866
4.	Bajeng Barat	13.503	13.713	27.216
5.	Palangga	62.182	63.151	125.333
6.	Barombong	22.008	22.391	44.399
7.	Somba Upo	84.953	87.265	172.218
8.	Bontomarannu	20.286	20.650	40.936
9.	Pattalassang	15.213	15.432	30.645
10.	Parangloe	9.385	9.554	18.939
11.	Manuju	7.634	7.673	15.307
12.	Tinggimoncong	11.673	11.594	23.267
13.	Tombolo Pao	15.531	14.836	30.367
14.	Parigi	6.618	7.082	13.700
15.	Bungaya	8.627	8.969	17.596
16.	Bontolempangan	7.793	7.933	15.726
17.	Tompobulu	14.592	14.827	29.419
18.	Biringbulu	15.342	15.719	31.061
Kabupaten Gowa		389.078	396.758	785.836

Sumber : Bps Kabupaten Gowa Tahun 2021

B. Deskripsi Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial yaitu satu diantara instansi yang berada di bawah Kementerian Sosial yang bertugas menyelenggarakan hal yang terkait bidang jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta menanganai fakir miskin dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dinas sosial Kabupaten Gowa adalah pembantu bupati untuk menjalankan kepercayaannya serta menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yang merupakan wewenang daerah sert tugas pembantuan yang diberikan pada daerah didasarkan pada aturan undang-undang serta pedoman yang diberlakukan demi kelancaran tugas. Sesuai regulasi ataupun peraturan pembentukan struktur yang baru yang yang didasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdiri sendiri. Sebelum adanya regulasi atau aturan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Gowa tergabung dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Kantor Dinas sosial Kabupaten Gowa belikasi di Jalan Masjid Raya Nomor 30, Somba Opu, Sunguminasa. Telp (0411)882272

Adapun Visi Dinas Sosial Kabupaten Gowa yaitu :

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan relegius.” Sementara

Misinya adalah:

- Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
- Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Meningkatkan mutu pelayanan publik dan administrasi perkantoran

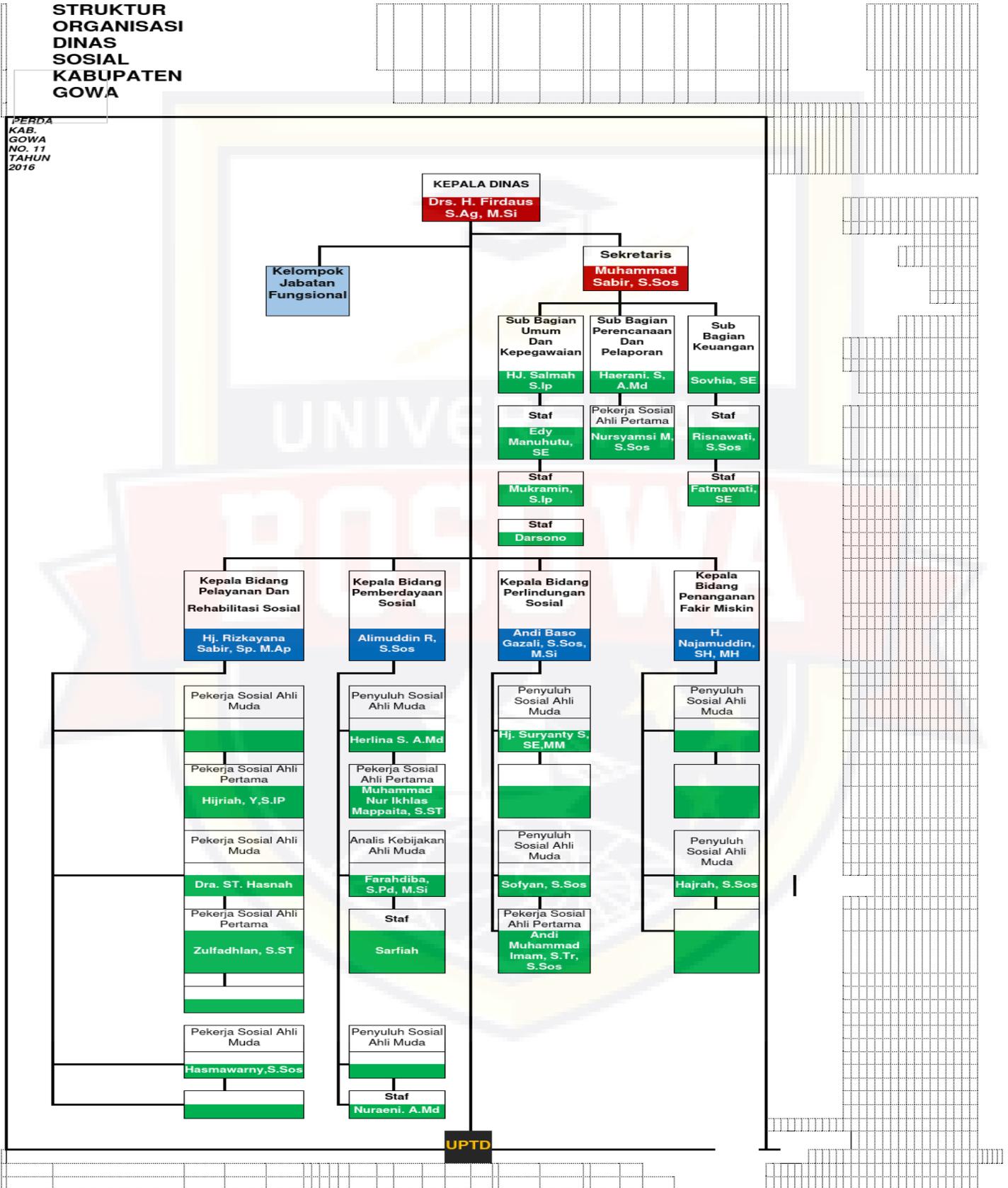
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gowa yaitu :

- Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.
- Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat

Dinas sosial masih merupakan bagian dari struktur pemerintahan Kabupaten Gowa. Yang kepengurusannya tersusu atas kepala dinas, sekretaris, kelompok jabatan fungsional, sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian umum dan kepagawaian, kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang tersusun atas kepala seksi kessos tuna sosial, kepala seksi kessos lansia dan penyandang disabilitas, serta kepala seksi kessos anak. Kepala bidang pemberdayaan sosial yang tersusun atas kepala seksi pembangunan dan pembinaan lembaga sosial, kepala seksi pelestarian^d nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan, serta kepala seksi pemberdayaan fakir miskin.

Kepala bidang perlindungan sosial yang tersusun atas kepala seksi jaminan sosial serta kepala seksi advokasi dan perlindungan sosial, kepala seksi pembinaan sosial spritual yang tersusun atas kepala seksi pembinaan sarana dan lembaga kerohanian serta Kepala bidang pembinaan mental spritual. Sementara bagan struktur organisasi dinas sosial kabupaten Gowa yaitu

Gambar 3 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Gowa



- ❖ Tugas serta Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gowa
 - a. Tugas serta Fungsi Kepala Dinas, didasarkan pada Pasal 4, yakni:
 - Kepala dinas bertugas menjadi pemimpin serta pelaksana urusan pemerintah daerah (Pemnda) di bidang sosial didasarkan pada wewenang serta tugas pembantuan menurut ketentuan aruran undang-undang.
 - Kepala dinas ketika menjalankan tugasnya seperti yang termuat pada poin di atas, menyelenggarakan fungsi; merumuskan kebijakan urusan pemerintah di bidang sosial, melaksanakan kebijakan urusan pemerintah di bidang sosial, melaksanakan penilaian serta pelaporan urusan pemerintah di bidang sosial, melaksanakan administrasi kedinasan, serta melaksanakan fungsi lainnya yang bupati berikan yang berkaitan dengan fungsi serta tugasnya.
 - b. Tugas serta Fungsi Sekretariat, didasarkan pada Pasal 5 yaitu:
 - Sekretariat bertugas membantu kepala dinas untuk melakukan koordinasi aktivitas, memberi layanan teknis serta administrasi terkait dengan pembuatan perencanaan serta pelaporan, keuangan, serta umum juga kepegawaian di lingkungan dinas.
 - Menjaankan tugas seperti yang termuat pada poin di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi: koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; melakukan koordinasi dalam pembuatan perencanaan serta pelaporan, melakukan koordinasi urusan umum serta kepegawaian, melakukan koordinasi dalam tata kelola administrasi keuangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya menurut bidang tugasnya.

c. Tugas serta Fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, didasarkan pada Pasal yakni:

- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melakukan koordinasi pelaksanaan aktivitas pelayanan serta rehabilitasi sosial yang mencakup bidang kesejahteraan sosial tuna sosial, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta kesejahteraan sosial anak, dan sesuai cakupan tugasnya dalam melaksanakan tugas pembantuan.
- melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada poin di atas, kepala bidang berfungsi: melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan serta rehabilitasi sosial yang mencakup bidang kesejahteraan sosial tuna sosial, kesejahteraan sosial lanjut usia serta penyandang disabilitas, serta kesejahteraan sosial anak dan; melaksanakan kebijakan teknis pelayanan serta rehabilitasi sosial yang mencakup bidang kesejahteraan sosial tuna sosial, kesejahteraan sosial lanjut usia serta penyandang disabilitas, serta kesejahteraan sosial anak; melaksanakan evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan serta rehabilitasi sosial yang mencakup bidang kesejahteraan sosial tuna sosial, kesejahteraan sosial lanjut usia serta penyandang disabilitas, serta kesejahteraan sosial anak; serta melaksanakan administrasi pelayanan serta rehabilitasi sosial yang mencakup bidang kesejahteraan sosial tuna sosial, kesejahteraan sosial lanjut usia serta penyandang disabilitas, serta kesejahteraan sosial anak.

d. Tugas serta Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial, didasarkan pada Pasal 13 yakni:

- Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, bertugas membantu kepala dinas membuat perencanaan operasionalisasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial yang mencakup perizinan dan pembinaan lembaga sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan serta pemberdayaan fakir miskin, menurut cakupan tugasnya dalam melaksanakan tugas pembantuan.
- melaksanakan tugas seperti yang tercantum pada pou di atas, kepala bidang berfungsi; membuat rumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, melaksanakan administrasi pemberdayaan sosial, melaksanakan evaluasi dan serta bidang pemberdayaan sosial, serta melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan sosial.

e. Tugas serta Fungsi Bidang Pembinaan Sosial Spiritual, didasarkan pada Pasal 20 yakni:

- Bidang pembinaan Sosial Spiritual dipimpin oleh kepala bidang, bertugas membantu kepala dinas untuk menyelenggarakan serta melaksanakan aktivitas pembinaan sosial spiritual menurut cakupan tugasnya dalam melaksanakan tugas pembantuan.
- Melaksanakan tugas seperti yang termuat pada poin di atas. Kepala bidang berfungsi: membuat rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan sosial spiritual, melaksanakan administrasi pembinaan sosial spiritual, melaksanakan evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan sosial spiritual, serta melaksanakan kebijakan teknis pembinaan sosial spiritual.

Pada penelitian ini, data yang paling penting ataupun yang menjadi data primernya yaitu hasil wawancara. Sebab penelitian ini meneliti mengenai peran dinas sosial dalam upaya menertibkan anak jalanan serta pengamen di kabupaten Gowa. Maka, peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang memiliki tugas di bidang Rehabilitasi Sosial Anak.

C. Perkembangan kasus anak jalanan dan Pengamen yang terjadi di Kabupaten Gowa setiap tahunnya.

Kedudukan Kabupaten Gowa yang menjadi satu diantara kota metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya tarik yang khas bagi keberlangsungan bermacam aktivitas bisnis serta pembangunan, akan tetapi dampak dari bermacam kebijakan pembangunan pun dapat bisa menghindari munculnya masalah sosial yang yang bisa mengganggu ketertiban sosial serta ketentraman yang diakibatkan oleh perbuatan sekelompok anak jalanan (Anjal) serta pengamen.

Adanya anjal di suatu kabupaten atau kota merupakan masalah klasik yang harus pemerintah hadapi. Menurut UUD 1945 pasal 34, disebutkan bahwa negara harus memelihara anak terlantar serta fakir miskin. Untuk itu pemerintah melakukan beragam cara untuk menurunkan angka Anjal serta pengamen.

Anjal yaitu anak yang waktu kesehariannya dihabiskan untuk beraktivitas di jalanan, baik demi mendapatkan penghasilan ataupun hanya berkeliaran di jalanan serta berbagai tempat umum yang lain. Anjal memiliki karakteristik umum, misalnya usianya ada diantar 5 hingga 18 tahun, beraktivitas ataupun berkeliaran di jalanan, mayoritas memiliki penampilan yang kusam serta pakaiannya tak terurus, dan memiliki mobilitas yang tinggi.

Hal yang menyebabkan anak turun kejalanan terutama dikarenakan kesulitan ekonomi keluarga, meskipun bisa juga disebabkan oleh faktor lainnya, misalnya rumah tangga yang

tidak harmonis, orang tua yang bercerai, dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya ataupun temannya. Sulitnya ekonomi bisa menimbulkan lingkungan keluarga yang tidak kondusif yang membuat tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, serta anak akan berusaha menemukan cara supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Hidup di jalanan ataupun menjadi pengamen bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, namun karena terpaksa dan menjadi kondisi yang harus diterima karena berbagai sebab. Secara psikologis mereka merupakan anak-anak yang mana aspek emosinya serta mentalnya belumlah kokoh, sedangkan di saat yang bersamaan mereka diharuskan mengalami hidup di jalanan yang keras serta akan memberi pengaruh pada perkembangan serta pembentukan kepribadian mereka. Aspek psikologis tersebut memberi dampak yang kuat dalam aspek sosialnya. Tampilan mereka yang lusuh, menimbulkan citra negatif dari masyarakat, yang menjadikan mereka dianggap sebagai biang keonaran, kekumuhan, pencurian, bahkan sampah masyarakat yang seharusnya diasingkan.

Selanjutnya perkembangan Anjal serta pengamen di Kabupaten Gowa pada beberapa tahun terakhir ini adalah:

No	Tahun	Jumlah		
		Anak Jalanan	Pengamen	Total
1	2019	110	85	195
2	2020	98	77	175
3	2021	120	98	218
	Rata-rata	328	260	588

Tabel 2. Jumlah anjal dan pengamen di Kab.Gowa, tahun 2019 – 2021. Sumber dinas sosial gowa tahun 2022

Didasarkan data tersebut bisa di lihat bahwasanya total Anjal serta pengame dalam 3 tahun terjadi kenaikan serta penurunan. Penurunan anak jalanan dari 2019 ke 2020 terjadi karena pada saat itu wilayah Kabupaten Gowa memberlakukan PSBB/ PPKM sebagai pencegahan

sebaran virus Covid – 19, jadi pada tahun tersebut ada penurunan jumlah anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa , tetapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali dikarenakan ada pelonggaran pembatasan wilayah di Kabupaten Gowa sehingga mengalami kenaikan pada tahun tersebut. Umumnya mereka berkeliaran di jalanan sejak umur belasan tahun, namun ada juga yang dari usia di bawah sepuluh tahun. Anjal dipandang dari penyebabnya juga intensitasnya di jalanan, sejatinya tak bisa digeneralisasi. Dipandang dari penyebabnya, mungkin sekali tak semua Anjal serta pengamen berkeliaran di jalanan dikarenakan tuntutan ekonomi, mungkin saja dikarenakan pilihannya sendiri, tekanan orang tuanya, serta pergaulan.

Sebelum melakukan penanganan, Dinas sosial Kabupaten Gowa membentuk Tim Kerja yang tujuannya untuk memberikan bantuan upaya menertibkan Anjal serta pengamen di lapangan. Tim Kerja ini melibatkan: Dinas Sosial, Tim Tagana, Pekerja Sosial dan Satpol PP. Tim kerja ini akan secara langsung melaksanakan tugas di lapangan yakni menjaring ataupun menertibkan. Penjaringan dilaksanakan di semua pusat keramaian.

Salah satu narasumber dari Dinas Sosial, Ibu Hj.Rizkayana Sabir,SP.,M.SI mengatakan:

“kalau tiap tahun, dari tahun 2019 sampai 2021 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2020 itu sendiri terjadi penurunan diakibatkan pandemi covid-19 dan naik kembali pada tahun 2021 .Dan kebanyakan anak jalanan dan pengamen yang kena razia bukan yang berdomisili di kabupaten Gowa, 20 persen mereka warga gowa, selebihnya 80 persen dari luar kabupaten Gowa”

Sependapat dengan pernyataan diatas :

“anak jalanan dan pengamen untuk setiap tahunnya peningkatannya itu tidak pasti, kadang sudah ada penurunan anak jalanan, kemudian bulan depannya bisa meningkat lagi. Apalagi kalo ada acara-acara besar di Kabupaten Gowa, itu pasti nanti

mengalami peningkatan. Jadi tidak selalu berkurang secara terus-menerus (Ibu Hasmawarny,S.Sos selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Gowa)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Menurut beliau jumlah anak jalanan mulai dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan maupun peningkatan. Penurunan anak jalanan dan pengamen yang terjadi di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 yaitu pada saat adanya Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PSBB maupun PPKM di wilayah Kabupaten Gowa dan mulai mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Jumlah anak jalanan dan pengamen tidak sepenuhnya yang terkena razia berasal dari Kabupaten Gowa, namun juga berasal dari luar Kabupaten Gowa, bahkan yang mendominasi rata-rata berasal dari Kabupaten Gowa. Setelah dilakukan penjarangan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap anak yang terjaring. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak yang meliputi nama, umur, alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan. Proses Identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal. Ibu Hj.Rizkayana Sabir,SP.,M.SI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam wawacaranya mengungkapkan :

“ Semua yang terjaring dalam penertiban ini dibawa ke mako Tagana Gowa untuk diasesmen dan dipanggilkan orang tua/walinya, kemudian dicari tahu apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut dijalanan. Setelah memberikan edukasi kepada yang bersangkutan (anak jalanan atau pengamen) beserta orang tuanya, mereka dipulangkan dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan untuk tidak membiarkan anaknya kembali ke jalan.”

Lanjut informan yang sama:

“ faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan atau pengamen itu kebanyakan karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang

mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtuanya, kadang itu juga mereka itu dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen dan turun ke jalan sama orang tuanya, jadi ya sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari kecil untuk mencari uang” (Ibu Hj.Rizkayana Sabir,SP.,M.SI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)

Tak jauh berbeda dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Dra.ST.Hasnah, selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Gowa memaparkan bahwa penyebab terjadinya anak jalan dan pengamen yaitu :

“ setelah dilakukan assesment oleh dinas sosial kendala utama mereka menjadi anak jalanan dan pengamen yaitu kebanyakan masalah faktor ekonomi sehingga mereka rela putus sekolah demi membantu keluarganya mencari uang, dan alasan lain dikarenakan cuman ikut-ikutan dengan temannya”.

Didasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasanya faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Kabupaten Gowa yang pertama yang merupakan faktor utama ialah kendala perekonomian. Anjal dan pengamen umumnya tumbuh dari keluarga yang kekurangan secara ekonomi, kebutuhan hidup yang mulai mendesak serta dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, menjadikan mereka semenjak kecil telah diajari bekerja di jalanan, bisa menjadi pengamen, pengemis, ataupun pedagang asongan. Faktor kedua yang menyebabkan munculnya Anjal dan pengamen adalah ketidakharmonisan keluarga ataupun akibat perceraian orang tua. Akibat buruk dari orang tua yang bercerai adalah bisa mengakibatkan anak-anaknya memilih hidup dengan dengan anak-anak lainnya yang memiliki pengalaman yang sama. Anak adalah tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi di kasus seperti ini umumnya mereka kurang memperoleh kasih sayang serta perhatian orang tuanya yang bercerai. Faktor yang ketiga yaitu sekadar ikut-ikutan temannya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Fikar (12 tahun) satu diantara pengamen cilik yang ada di perbatasan Gowa - Makassar, berikut ini:

“Saya mulai mengamen pada awal tahun 2022, dan alasan saya mengamen karena saya ingin membantu orang tua saya dalam mencari uang. Saya juga pernah ditangkap sama Dinas Sosial, dan dibawah kekantor sampai disana saya hanya di tanya dan dijelaskan kalau tidak boleh mengamen disini. Waktu mau pulang dikasihka beras dan uang dari dinas sosial.”

Fikar dalam wawancaranya menambahkan :

“Saya biasa mengamen disini dari jam 9 pagi sampai malam, kadang dapat 150 ribu perhari dan biasa saya kasihkan ke mamaku ini uang”.

Pernyataan ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Tami (15) yang di temui di kawasan Jalan Protokol Kabupaten Gowa, berikut ini:

“Saya sering di tangkap kak sama dinas sosial karena selalu ka jalan-jalan di sini sama teman-temanku, sampai disana juga di tanya - tanya dan sorenya di suruh pulang. Yang pertama itu saya ditangkap bersama teman – temanku dan yang kedua di tangkap pas ku sendiri.”

Tami dalam wawancaranya menambahkan :

“ Meskipun pernah ditangkap lalu di pulangkan saya tetap kembali ke jalanan karena untuk tambah tambah uangku dan bisa bantu keluargaku untuk cari uang dan kalau ada kulihat orang dinsos pasti saya lari agar tidak tertangkap kembali “

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber diatas dalam hal ini Anjal serta pengamen maka bisa disimpulkan bahwasanya :

Pihak dinas sosial melaksanakan penertiban pada Anjal dan pengamen di Kabupaten Gowa tetapi belum ada efek jera atau sanksi yang diberikan pada Anjal serta pengamen jadi mereka kembali menjalankan aktivitasnya di jalanan dan tidak adanya rumah singgah atau rumah pembinaan membuat pihak dinas sosial hanya memulangkan anak jalanan dan pengamen yang terjaring dalam penertiban tersebut,

Anak adalah generasi penerus masa depan suatu bangsa. Majunya suatu negara, generasi muda adalah penentunya. Kita bisa menyaksikan bahwasanya keadaan anak-anak Indonesia

semakin mengkhawatirkan. Tumbuh kembang anak-anak dilatarbelakangi oleh kemiskinan, minimnya pertanggungjawaban orang tua, hilangnya kasih sayang orang tua, hingga tindak kekerasan, yang menjadi pemicu anak-anak menampilkan tingkah laku yang negatif. Hal tersebut terindikasi melalui makin tingginya angka Anjal setiap tahunnya. Anjal sejatinya adalah korban dari kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan keliru dalam menangani rakyatnya, ditambah lagi adanya upaya menyalahgunakan amanat rakyat, yang artinya para Anjal pun adalah korban penyelewengan wewenang dari para oknum yang tak bertanggung jawab. Sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan program untuk mengentaskan permasalahan Anjal, namun dengan semakin meningkatnya angka Anjal, maka bisa dikatakan upaya tersebut tidak bisa menuntaskan permasalahan yang terjadi. Upaya menertibkan permasalahan Anjal serta pengamen perlu disesuaikan dengan karakteristik mereka. Mengenai jumlah Anjal di Kabupaten Gowa tiap tahunnya.

1. Evaluasi Peran Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen Di Kabupaten Gowa

Eksistensi Anjal dan pengamen adalah satu diantara masalah sosial yang memerlukan upaya penanganan yang intensif serta mendalam supaya dapat bersinggungan langsung pada akar penyebab masalahnya. Faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalan umumnya yaitu ekonomi yang sulit, yang dialami keluarga, meskipun terdapat faktor lainnya misalnya rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang cerai, dipengaruhi teman serta lingkungan sosialnya. Kesulitan ekonomi bisa menimbulkan kondisi yang tak kondusif di dalam keluarga jadi banyak kebutuhan pokok menjadi tak bisa dipenuhi, kemudian anak akan berusaha menemukan cara supaya dapat mencukupi kebutuhan tersebut.

Masalah ekonomi yang keluarga alami bisa mengakibatkan bermacam masalah, sebab dapat menimbulkan keadaan keluarga yang tak kondusif yang pada akhirnya mengakibatkan tak terpenuhinya hak serta kebutuhan anak. Oleh karena kebutuhan anak tak bisa dipenuhi maka anak berupaya menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan caranya yaitu turun ke jalanan untuk mengamen. Di samping karena kesulitan ekonomi, faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan adalah keluarga yang broken home.

Penertiban anak jalanan, pengemis, serta gelandangan, merupakan sebuah cara ataupun tindakan yang sering kita dengar yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dalam rangka melakukan penertiban pada seorang individu ataupun kelompok yang mengemis di berbagai tempat umum demi menciptakan ketertiban umum. Permasalahan Anjal serta pengamen pada dasarnya terkait erat pada permasalahan keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Gowa. Melalui peningkatan angka Anjal serta pengamen membuka peluang timbulnya gangguan ketertiban serta keamanan, yang pada saatnya dapat menimbulkan gangguan pada stabilitas yang bisa menyebabkan gangguan pada upaya pembangunan dan cita-cita negara.

Dinas Sosial Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah kabupaten Gowa dalam bidang pembinaan kesejahteraan social, rehabilitasi social dan pembinaan tenaga kerja. Dinas Sosial Kabupaten Gowa ketika melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen dibawah umur mengacu pada Perda Gowa No. 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dimana perda ini dipakai dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu untuk mmeberikan jaminan bisa dipenuhinya berbagai hak anak supaya bisa hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi dengan cara yang optimal didasarkan pada harkat serta martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari tindak penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, serta kekerasan, dengan cara yang sistematis, terintegrasi, serta berkesesinambungan

Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah lembaga yang bertanggung jawab atau mempunyai peran dalam upaya penanganan Anjal dan pengamen. Dinas Sosial Kabupaten sudah melaksanakan bermacam upaya untuk menangani permasalahan sosial Anjal dan pengamen yang menjadi fenomena sosial yang tak dapat terhidarkan keberadaanya di kehidupan masyarakat, khususnya dikawasan perkotaan, Untuk melihat lebih jauh mengenai peranan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penanganan Anjal dan pengamen di Kabupaten Gowa berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Gowa, yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Hj.Rizkayana Sabir,SP.,M.SI yang mengatakan:

“ di Dinsos Gowa ini ada namanya program Pekan Tertib. Kegiatan program Pekan tertib ini kami rutin adakan 7 hari selama 1 bulan sekali. Kegiatan Pekan tertib ini diadakan untuk memantau anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di Kabupaten Gowa. Namun, ketika kegiatan patroli/pekan tertib berlangsung ternyata masih ada yang kedapatan melakukan

aktivitasnya, Maka pihak aparatpun yang turun melakukan patroli langsung untuk segera menjaring yang kedapatan.

Lanjut Informan yang sama Ibu Hj. Rizkayana Sabir,SP.,M.Si :

“ dalam penertiban anak jalanan dan pengamen ini dinas sosial bekerja sama dengan pekerja sosial, tim tagana, dan satpol PP . Adapun penertiban ini dilakukan 1 bulan sekali dengan sasaran lokasi di tempat-tempat keramaian seperti di jalan malengkeri (perbatasan makassar-gowa) dan di jalan protokol kabupaten gowa”

Ibu Hasmawarny,S.Sos selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Gowa menambahkan dalam wawancara dengan peneliti :

“Dinas Sosial itukan tiap bulannya ada yang namanya razia atau pekan tertib, nah dirazia itulah kita menjaring anak-anak jalanan itu untuk didata. Terus kalau misalnya dia masih sekolah, kita kembalikan ke orangtuanya. Orangtuanyayang kita patok untuk mengawasi anaknya. Biar anak ini bisa sekolah tidak dijalanan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasanya dalam penertiban Anjal dan pengamen di Kabupaten Gowa, Dinas Sosial Gowa memiliki program yakni Pekan tertib yang dimana kegiatan penertiban Anak jalanan dan pengamen ini di Kabupaten Gowa dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan serta bekerja sama dengan Satpol PP, Tim Tagana Gowa dan pekerja sosial. Apabila dalam penertiban masih ditemukan aktivitas mengemis dan mengamen, , maka pihak aparat akan segera menjaring pengamen dan anak jalanan tersebut. Anak Jalanan dan Pengamen di Kabupaten Gowa sendiri kadang mengalami kenaikan bahkan penurunan setiap bulannya, apalagi dalam mengadakan kegiatan atau event besar jumlah anak jalanan dan pengamen akan mengalami kenaikan..Dinas Sosial Kabupaten Gowa sejauh ini intens melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya pengamen, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kabupaten Gowa.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengatakan :

“Kami melalui tim tagana dan pekerja sosial (Peksos) rutin melakukan penertiban pengamen dan anak jalanan termasuk di perbatasan gowa Makassar,”Biasa kita turun razia tapi biasanya bukan penduduk Gowa seperti pengamen yang mangkal di perbatasan Gowa, mereka warga Makassar yang hanya mencari uang di Gowa.

Lanjut informan yang sama menuturkan, persoalan yang dihadapinya karena mereka terkadang hanya pindah ke wilayah Makassar sehingga bukan menjadi kewenangan :

“Kami biasanya harus kucing-kucingan dengan mereka karena pada saat kami datang mereka langsung nyebrang ke wilayah Makassar dan tentunya itu bukan wilayah kewenangan kami,komunikasi akan segera saya lakukan dengan kepala Dinas Sosial kota Makassar, agar persoalan sosial ini bisa di tangani dengan baik,

Dari wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pihak dinas sosial sudah menjalankan tugasnya dalam hal penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa tetapi mereka mendapat persoalan dalam hal dilapangan karena pengamen dan anak jalanan ketika akan dilakukan penertiban, mereka lari atau menyebrang di Kawasan makassar sehingga pihak Dinas Sosial tidak mempunyai kewenangan melakukan penjaringan di wilayah tersebut. Untuk itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Gowa akan melakukan koordinasi ke pihak Dinas Sosial Kota Makassar dalam menyikapi persoalan tersebut agar kejadian tersebut bisa dicarikan solusi apabila terulang kembali. Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam penertiban anak jalanan dan pengamen sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna.

Adapun Indikator Evaluasi Penertiban Dalam penelitian ini yaitu

1. Efektivitas Penertiban .

Terkait dengan hasil penelitian mengenai efektivitas, efektivitas berdasarkan teori Dunn menyebutkan bahwasanya efektivitas yakni apakah hasil yang diharapkan bisa dicapai. Pencapaian tujuan terkait pada rentang waktu pelaksanaan suatu kebijakan, dasar hukum, serta sasaran program.

didasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya upaya penertiban Anjal dan Pengamen di Kabupaten Gowa masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Berlandaskan Perda Kabupaten Gowa No. 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Gowa berusaha membantu pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyelesaikan permasalahan Anjal dan pengamen melalui pelaksanaan Pekan Tertib. Sesuai pada Bab VI Pasal 30 Perda Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana strategis untuk melindungi anak dalam jangka pendek, menengah serta Panjang , menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi bagi sementara itu munculnya para Anjal ini dikarenakan sejumlah faktor, misalnya kemiskinan, broken home, dan lain-lain. Hal tersebut tak hanya disebabkan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta sandang, namun jauh lebih dari itu yang berkaitan dengan kebutuhan agar bisa eksis di tengah kerasnya hidup di perkotaan.

2. Kecukupan Penertiban

Kecukupan untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan yang diharapkan, seberapa jauh pencapaian hasil ini bisa menuntaskan permasalahan yang terkait pada upaya pemuasan kebutuhan, kesempatan ataupun nilai. Dunn (2000:427) mengatakan bahwa kecukupan terkait dengan sejauh mana hasil yang sudah dicapai bisa memecahkan permasalahan. Kecukupan masih terkait pada efektivitas melalui pengukuran ataupun prediksi sejauh mana

alternatif yang tersedia bisa memberi kepuasan terhadap kebutuhan, kesempatan ataupun nilai untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian mengungkap bahwasanya penertiban Anjal dan pengamen yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Gowa masih belum mampu memecahkan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang selalu ada di Kabupaten Gowa. Para Anjal dan pengamen yang umumnya masih di bawah umur kembali melakukan rutinitas mengamen dan mengemis di jalanan meskipun sudah dilakukan penertiban oleh Dinas Sosial

3. Responsivitas Penertiban

Responsivitas menurut konsep evaluasi program merupakan upaya memberikan jawaban terhadap pertanyaan, apakah hasil kebijakan memberi kepuasan terhadap kebutuhan, nilai, ataupun preferensi dari berbagai kelompok tertentu. Sebuah kebijakan yang hasilnya sudah memberikan kepuasan pada berbagai kelompok tertentu artinya sudah berhasil dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi. walaupun tak dapat memuaskan seluruh pihak. William N. Dunn (2000:429) mengatakan bahwasanya responsivitas (responsiveness) terkait pada sejauh mana sebuah kebijakan bisa memberi kepuasan terhadap kebutuhan, nilai, ataupun preferensi berbagai kelompok masyarakat tertentu.

Didasarkan pada hasil penelitian, ada banyak masyarakat yang mengkritik Dinas Sosial berkaitan dengan upaya penertiban. Masyarakat menganggap bahwasanya upaya penertiban yang dilaksanakan masih belum memberi hasil yang optimal. Anak Jalanan dan Pengamen masihlah serta banyak yang kembali ke jalanan setelah pelaksanaan penertiban. Maka usaha penertiban Anjal dan pengamen dari Dinas Sosial belum bisa berdampak positif serta belum memuaskan setelah dilaksanakannya penertiban tersebut.

4. Ketepatan Penertiban

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok-kelompok sasaran perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat. Menurut Dunn (2000:429) Ketepatan berkenaan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya permasalahan anak jalanan di Kabupaten Gowa tidak ada habisnya dan sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk itu adanya kebijakan pembinaan anak jalanan dan pengamen merupakan salah satu cara yang cukup tepat dalam mengurangi masalah anak jalanan dan pengamen yang ada di Kabupaten Gowa, selain penertiban anak jalanan. Karena observasi awal peneliti kepada informan bahwa belum adanya rumah pembinaan dalam penanganan anak jalanan dan pengamen di kabupaten gowa serta tidak adanya produk hukum atau aturan yang menangani permasalahan pembinaan anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa sehingga Dinas Sosial Gowa tidak bisa memberikan sanksi kepada anak jalanan dan pengamen yang masih terus melakukan aktivitas dijalanan pasca sudah dilakukannya penertiban

2. Faktor – Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan Dan Pengamen di Kabupaten Gowa

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala/hambatan yang dihadapi dalam penertiban anak jalanan dan pengamen ini adalah keterbatasan dana atau anggaran untuk mendirikan rumah singgah/panti sosial, sarana dan prasarana yang minim. Disamping itu, sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen, sehingga instansi lain turut ikutserta menangani penertiban anak jalanan dan pengamen tersebut. Ada beberapa Pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen yaitu :

A. Faktor Pendukung

Ada beberapa factor pendukung yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen yaitu :

1. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini anak jalanan dan pengamen di bawah umur
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa. Dalam mendukung program penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa tidak terlepas dari beberapa instansi dan Lembaga yang ikut andil dalam hal tersebut. Dalam hal penertiban saja adanya kinerja dari aparatur baik dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tim Tagana Gowa, Pekerja Sosial dan Satpol PP. Dengan adanya sumber daya manusia tersebut dapat meringankan tugas dari Dinas Sosial dalam hal penertiban anak jalan dan pengamen di Kabupaten Gowa

B. Faktor Penghambat

Ada beberapa factor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen yaitu :

1. **Kurangnya sarana dan prasarana** yaitu tidak adanya panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan dan pengamen yang tertangkap. Inilah yang menjadi satu kendala dalam hal penanganan anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa karena jika ada tempat rehabilitasi atau rumah singgah, jumlah akan adanya anak jalanan dan pengamen setiap tahunnya akan menurun dengan memberikan mereka tempat untuk bisa mengasah keterampilan melalui minat dan bakatnya selain itu mereka lebih bisa mengisi waktunya dengan hal yang lebih produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan didalam tempat rehabilitasi, jadi untuk memberikan mereka ruang untuk dijalan sangat kecil. Serta mobil pengangkut untuk anak jalanan dan pengamen tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Gowa. Selama ini alat transportasi tersebut berasal dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan atau Satpol PP Kabupaten Gowa yang digunakan dalam melaksanakan penertiban anak jalanan dan pengamen
2. **Kurangnya anggaran dana** dalam program penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban dan pembinaan anak jalanan dan pengamen sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran yang dibutuhkan sangat minim
3. **Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.** Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan dan pengamen, tentunya tidak hanya terletak pada aparturnya saja tetapi dibutuhkan partisipasi dan perhatian masyarakat karena masyarakat Gowa menjadi objek utama dari para anak jalanan dan pengamen untuk mendapatkan penghasilan dengan pemberian uang secara langsung akan memberikan

kebiasaan kepada anak jalanan dan pengamen untuk Kembali turun ke jalan. Adapun kampanye dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Gowa belum merata ke semua lapisan masyarakat karena masih ada saja masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan dan pengamen dengan rasa iba

4. **Tidak adanya produk hukum atau peraturan daerah** yang mengatur terkait pembinaan bagi anak jalanan dan pengamen serta sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak jalanan dan pengamen efek jera, sehingga mereka masih mengulangi lagi melakukan aktivitas meminta- minta didepan umum

5. **Adanya Koordinator Anak Jalanan** yang masih mengarahkan agar anak-anak kembali turun kejalanan

6. **Sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan dan pengamen** melalui bantuan serta pemahaman yang telah diberikan oleh pihak dinas sosial gowa agar tidak Kembali turun ke jalanan

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab diatas Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak jalanan dan Pengamen di Kabupaten Gowa seperti yang telah dikutip pada bab-bab sebelumnya maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa masih belum optimal, ini dapat di lihat dari kinerja Dinas Sosial kota yang hanya bertugas penertiban saja, tetapi dalam upaya pembinaannya tidak ada dikarenakan belum adanya rumah singgah atau tempat binaan bagi anak jalanan dan pengamen bagi anak jalanan dan pengamen yang terjaring dari kegiatan penertiban. Adapun indikator evaluasi penertiban anak jalanan dan pengamen meliputi :

- **Efektivitas Penertiban .**
- **Kecukupan Penertiban**
- **Responsivitas Penertiban**
- **Ketepatan Penertiban**

- 3 Adapun faktor pendukung dalam oenertiban anak jalanan dan pengamen ini di Kabupaten Gowa yaitu Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa. Adapun faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa ini yaitu Kurangnya Sarana dan Prasarana yang disediakan Pihak Dinas Sosial bagi anak jalanan dan pengamen yang terjaring penertiban, Kurangnya Anggaran Dana yang di miliki oleh Dinas Sosial dalam menyediakan Rumah Singgah atau Rumah Pembinaan, Kurangnya

Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan pengamen, Tidak adanya produk hukum atau peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi – sanksi yang diberikan kepada anak jalanan dan pengamen , Sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan dan pengamen serta adanya koordinator anak jalanan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait]peran Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menangani anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti/penulis yaitu:

1. Dinas Sosial harus melakukan pembinaan terhadap orang tua anak jalanan, apabila kembali ke jalan diberi sanksi kurungan atau denda, membuat rumah singgah dan memberikan latihan dasar ketrampilan agar mampu melakukan usaha produktif seperti home industri, jika anak jalanan tersebut tidak memiliki keluarga, dinas sosial menyediakan penampungan anak jalanan atau rumah singgah dan disana mereka diberi pembinaan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gowa hendaknya membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembinaan anak jalanan dan pengamen agar bisa menjadi rujukan Dinas Sosial dalam mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam hal ini anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa
3. Bagi Akademisi, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi atau rujukan bagi para pembaca dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Bandung: Alfabeta

Abraham Frangindae, *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*,

Jakarta: 2008

Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung

Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Fajar

Intetpratama Mandiri

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cet. II. Bandung:

P.T. Refika Aditama, 2010.

Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.

Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Shalahuddin, Odi. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Yayasan Setara Semarang,

Semarang.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta

Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.

Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendampingan Anak Jalanan*. Semarang :

Yayasan Setara

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana, Jakarta.

Jurnal

Angraeni M,. (2016). *Evaluasi Penertiban Anak Jalanan Di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemi, Anak Jalanan, dan Gelandangan).*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Journal Administrasi Publik,
Vol.4 Nomor 2 : Universitas Mulawarman

Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, 2019. *Penanganan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang.* Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7, No. 2, Desember 2019

Fadillah, Ade. (2017). *Fenomena Pengemis di Kota Langsa; Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis,* Jurnal Islam Ilmiah, Vol. 2 No. 2.

Ramadhani. (2016). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Kota Banjarmasin.* Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.6 No. 6 : Universitas Lambung Mangkurat

Sakman, 2016. *Studi Anak Jalanan (Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar).* Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 2, Oktober 2016

Suryadi, dkk .2020. *Fenomena Anak Jalanan Di Kota Cirebon.* Jurnal Equalita, Vol. 2 No. 1, Juni 2020.

Syahrul dan Amika Wardana, 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta.* Jurnal Harmoni Sosial: Pendidikan IPS, Vol. 4, No. 2, September 2017

Zamharira, Cut & Arantika, Puspita, Desi. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam*

Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. jurnal (UIN) Ar-Raniry: Banda Aceh

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 , Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi perangkat daerah*

*Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak*

BOSOWA

LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Izin Penelitian Dari Universitas Bosowa

**UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.368/FSP/UNIBOS/VII/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Di-
Kabupaten Gowa

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	Deden Hendrawan
NIM	4518021038
Judul penelitian	Evaluasi Peran Dinas Sosial Gowa Dalam Penertiban Pengamen Dan Anak Jalan Di Wilayah Kabupaten Gowa
Tempat	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Waktu	Juli - Agustus 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 20 Juli 2022
Dekan FSP Unibos,

Dr. A. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Tembusan :
1. Arsip

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS SOSIAL

Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa

Sungguminasa, 23 Agustus 2022

Nomor : 460 / 182 /DINSOS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada,
Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar**
Di-
Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. FIRDAUS, S.Ag.,M.Si**
Nip : 19710628 199303 1 012
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab. Gowa

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **Deden Hendrawan**
Nim : 4518021038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Adalah benar telah melaksanakan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi / tesis dengan judul **“EVALUASI PERAN DINAS SOSIAL GOWA DALAM PENERTIBAN PENGAMEN DAN ANAK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN GOWA”** Pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa, mulai bulan Juli s/d Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

Drs. H. FIRDAUS, S.Ag, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV.b
NIP : 197106281993031012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Gowa di Sungguminasa (Sebagai laporan)
2. Arsip

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Lampiran 3

Dokumentasi dan Wawancara dengan Informan



(Pengambilan Data Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa)



(Pengambilan Data Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa)



(Dokumentasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa)



(Dokumentasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa)

Dokumentasi Dengan Informan (*Bersama Ibu Hasmawarny,S.Sos dan Ibu Rizkayana,SP.,MSI*)



(Wawancara dengan Kepala Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Gowa)



(Dokumentasi Dengan Informan Penelitian di Kantor Dinsos Gowa)



(Dokumentasi dengan Pengamen di Kabupaten Gowa)

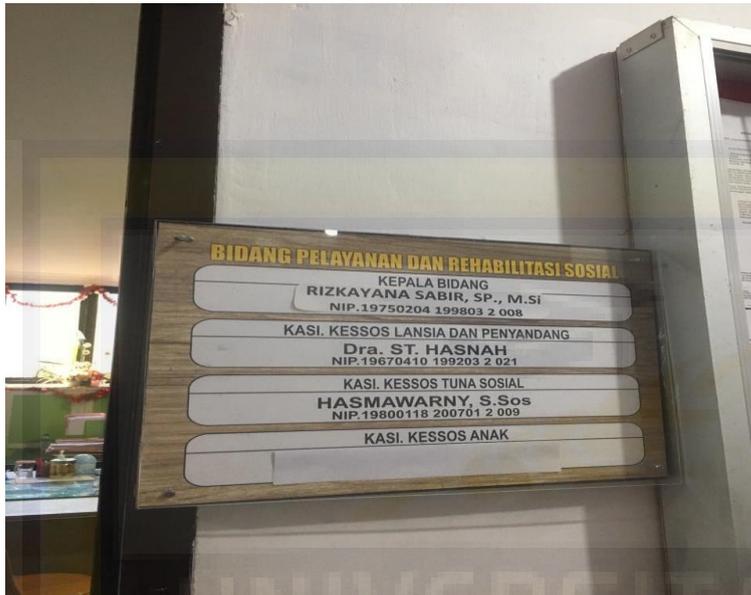


(Dokumentasi Anak Jalanan di Kabupaten Gowa)



(Dokumentasi Anak Jalanan di Kabupaten Gowa)

Struktur Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa



Kendaraan Dinas Sosial Kabupaten Gowa



I. Judul Penelitian

“ EVALUASI PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DAN PENGAMEN DI KABUPATEN GOWA ”

Pertanyaan Dinas Sosial Kabupaten Gowa

1. Apa saja Program Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa ?
2. Apa saja Faktor pendukung dan factor penghambat yang dialami pihak dinas sosial dalam melakukan penertiban ?
3. Apa factor penyebab adanya anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa ?
4. Siapa saja personil yang terlibat dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di kabupaten Gowa ?
5. Dimana tempat atau lokasi yang sering di lakukan penertiban ank jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa ?
6. Apakah anak jalanan dan pengamen yang sudah ditertibkan akan Kembali lagi ke jalanan ?
7. Apakah ada data dari pihak dinas sosial terkait anak jalanan dan pengamen mengalami kenaikan setiap tahunnya ? (tahun 2019 – 2021)
8. Apa yang menjadi rujukan atau peraturan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melaksanakan penertiban anak jalanan dan pengamen ?
9. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Gowa terhadap anak jalanan dan pengamen yang terjaring penertiban ?

Pertanyaan Anak Jalanan dan Pengamen

1. Apa faktor penyebab kamu menjadi anak jalanan/pengamen ?
2. Berapa penghasilan kamu menjadi anak jalanan/ pengamen per hari ?
3. Apakah kamu pernah terjaring penertiban Dinas Sosial ?
4. Berapa kali kamu terkena penertiban?
5. Mengapa kamu Kembali turun ke jalanan ?
6. Apakah orang tua anda tahu anda menjadi anak jalanan/pengamen ?
7. Apakah dinsos memberikan bantuan untuk anda?
8. Apakah saudara pernah dibawa ke rumah singgah oleh Dinas Sosial?
9. Apakah saudara mendapatkan pembinaan dirumah singgah?

BOSOWA

Pedoman Observasi

I. Judul Penelitian

**“ EVALUASI PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN
DAN PENGAMEN DI KABUPATEN GOWA ”**

II. Observasi Umum Penelitian

1. Profile Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa
2. Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Lampiran 6

Matriks penelitian

Matriks Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Informan	Wawancara	Observasi	Peraturan/Dokumen	Teori
1.	<p>Penertiban Dinas Sosial terhadap Anak Jalanan dan Pengamen di Kabupaten Gowa Adapun Indikator penertiban yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Penertiban, yaitu apakah hasil yang diinginkan tercapai • Kecukupan Penertiban, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah • Responsivitas Penertiban, yaitu seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. • Ketepatan Penertiban, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat. 	<p>1. Hj. Rizkayana Sabir, SP., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)</p> <p>2. Dra. ST. Hasnah (Pekerja Sosial Ahli Pertama)</p> <p>3. Hasmawarny, S.Sos (Pekerja Sosial Ahli Muda)</p> <p>4. Fikar (Pengamen Cilik)</p> <p>5. Tami (Anak Jalanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwa Dinsos Gowa melakukan penertinam selama 7 hari dalam sebulan. Program penertiban tersebut dinamakan Pekan Tertib yang tujuannya memantau atau menelusuri anjal dan pengamen di Kabupaten Gowa. • Wawancara Pekerja Sosial Ahli Muda mengungkapkan Dinas Sosial setiap bulannya ada Namanya patrol/Razia/pekan tertib, dalam pekan tertib terjaring anjal dan pengamen yang berstatus masih sekolah, maka pihak 	<p>Sesuai observasi peneliti bahwa dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa masih belum mencapai hasil yang diinginkan. Program Pekan Tertib masih belum mampu memecahkan masalah anjal dan pengamen dikarenakan mereka kembali melakukan rutinitas semula meskipun sudah dilakukan penertiban. Untuk itu adanya rumah pembinaan anjal dan pengamen merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah anjal dan pengamen. Pasal 30 Perda Gowa No. 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan</p>	<p>Peraturan Daerah Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	<p>Wirawan, (2011) menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi</p>

			memberitahukan orang tua nya untuk mengawasi anaknya untuk fokus menempuh Pendidikan dan tidak lagi kembali ke jalanan.	melakukan pembinaan, pengawasan, atau, pemantauan guna menangani permasalahan anak dalam hal ini anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa		
2.	Faktor penghambat dan pendukung penertiban anak jalanan dan pengamen yaitu : Penghambat 1. Tidak tersedianya Anggaran yang memadai 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Gowa 3. Belum Maksimal Sosialisai Kepada Masyarakat 4. Tidak adanya Regulasi atau kebijakan mengenai pembinaan anjal dan pengamen 5. Sulit merubah pola mental dan perilaku anjal dan pengamen	I. Hj. Rizkayana Sabir, SP., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)	Wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban ada beberapa hambatan dan dukungan yang dihadapi dinsos Gowa dalam menangani anak jalanan dan pengamen yaitu anak jalanan dan pengamen Ketika dilakukan penertiban mereka berlari ke wilayah Makassar sehingga pihak dinas sosial tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban, kurangnya dana/anggaran, tidak adanya mobil pengangkut, tidak adanya regulasi terkait	Sesuai observasi peneliti bahwa Pihak dinas sosial Kabupaten Gowa sudah menjalankan tugasnya dalam hal penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa tetapi mereka mendapat persoalan dalam hal dilapangan karena pengamen dan anak jalanan ketika akan dilakukan penertiban, mereka lari atau menyebrang di Kawasan makassar sehingga pihak Dinas Sosial tidak mempunyai kewenangan melakukan penjarangan di wilayah tersebut. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial memang belum cukup efektif, karena kenyataannya yang ditemui di lapangan,		Menurut Purba (2005) dalam Listya (2010) idikator sebuah program dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian actor yang terlibat, serta membangun system monitoring untuk program pembangunan selanjutnya.

<p>Pendukung</p> <p>1. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa</p> <p>2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam penertiban anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa.</p>	<p>pembinaan, pemberian uang kepada anak jalanan dan pengamen serta pola pikir anak jalanan dan pengamen yang masih tetap kembali ke jalanan meskipun sudah terjaring penertiban</p>	<p>bukan penurunan jumlah anak jalanan melainkan semakin bertambahnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun itu bisa dilihat dari data dari dinas sosial Gowa itu sendiri, serta upaya sosialisasi ke masyarakat masih dianggap kurang maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan dan pengamen. Untuk Peraturan Daerah Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang sudah dinilai begitu baik oleh pemerintah belum bisa menangani permasalahan anak jalanan dan pengamen yang masih meningkat. Meskipun peningkatannya tidak tajam, tetapi hal ini dikatakan belum optimal penanganannya dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan dan pengamen di</p>
---	--	---

				<p>Kabupaten Gowa. Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam penertiban anak jalanan dan pengamen sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna terkait penurunan anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Gowa</p>	
--	--	--	--	---	--

BOSOWA

